

EVALUASI PROGRAM PENAGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN DI DESA SUMBERDAWE KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

(The Evaluation of Poverty Feminization Program (PFK) in Sumberdawe Village of Maron Subdistrict of Probolinggo Regency)

SKRIPSI

Oleh

Fakhrudin Akhmad NIM 150910201009

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2020



EVALUASI PROGRAM PENAGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN DI DESA SUMBERDAWE KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Fakhrudin Akhmad NIM 150910201009

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTASI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2020

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Nur Hasanudin dan Ibu Sri Susilowati, terimakasih telah mendidik saya dengan penuh kesabaran, memberikan nasehat, kasih sayang yang tulus, dan dukungan baik moril maupun materil, serta doa yang tak pernah putus kalian panjatkan dalam mengiringi setiap langkah perjalanan hidup saya;
- 2. Semua guru yang telah mendidik, memberikan ilmu, serta membimbing saya mulai dari taman kanak kanak sampai dengan perguruan tinggi;
- 3. Almamater saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

"Poverty is not an accident, like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings" (Nelson Mandela)¹

"Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu" (Gus Dur)²

¹ https://montessori-esf.org/sites/default/files/downloads/files/160806QuoteNelsonMandela.pdf

⁽Diakses 10 Oktober 2020) https://nasional.kompas.com/read/2009/12/30/22035589/Pesan.Gus.Dur.Berbuat.Baik.Apa.Pun.S

uku.dan.Agamamu (Diakses 10 Oktober 2020)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhrudin Akhmad

NIM : 150910201009

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi: Ilmu Administrasi Negara

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Sumberdawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2020 Yang menyatakan,

> Fakhrudin Akhmad NIM 150910201009

SKRIPSI

EVALUASI PROGRAM PENAGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN DI DESA SUMBERDAWE KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

Oleh

Fakhrudin Akhmad NIM 150910201009

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agus Suharsono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Anwar, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Evaluasi Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Sumberdawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo" karya Fakhrudin Akhmad telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Selasa, 20 Oktober 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji: Ketua,

Dr. Sutomo, M.Si NIP 196503211991031003

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Agus Suharsono, M.Si NIP 196308141989031023 Drs. Anwar, M.Si

NIP 196306061988021001

Anggota III,

Anggota IV,

Drs. Boedijono, M.Si NIP 196103311989021001 M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP NIP 197410072000121001

Mengesahkan Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Evaluasi Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Di Desa Sumberdawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo; Fakhrudin Akhmad; 150910201009; 2020; 123 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Admnistrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 tentang Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) merupakan usaha dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya yakni melalui program penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK). Program PFK sendiri merupakan sub program Jalin Matra, yang mana fokus program ini ialah upaya pengentasan masalah kemiskinan bagi kepala rumah tangga perempuan (krtp) melalui bantuan berupa modal usaha senilai dua juta lima ratus ribu rupiah. Berdasarkan data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (tnp2k) Kabupaten Probolinggo menempati posisi pertama se- Jawa Timur sebagai kabupaten dengan krtp miskin terbanyak. Salah satu desa yang menerima bantuan program PFK di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 adalah Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron. Peneliti tertarik meneliti di desa Sumberdawe dikarenakan desa menerima bantuan program PFK paling banyak se Kecamatan Maron, yang mana Kecamatan Maron sendiri adalah wilayah dengan tingkat individu tidak bekerja cukup tinggi se-kabupaten serta sebagai wilayah dengan jumlah krtp miskin tertinggi se-kabupaten. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program jalin matra pfk di desa Sumberdawe selama setahun dilaksanakan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Fokus dalam penelitian ini ialah peneliti ingin melihat dan menilai bagaimana proses pelaksanaan program ini dilapangan, apakah sesuai dengan pedoman yang berlaku, apakah didistribusikan ke kelompok sasaran yang tepat, apakah waktu pelaksanaan sesuai yang dijadwalkan, dan kendala apa saja yang terjadi saat

proses pelaksanaan program berlangsung. Peneliti menggunakan pendekatan evaluasi proses retrospektif dan menggunakan enam karakteristik evaluasi dari William Dunn. Penelitian ini berlokasi di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2020. Sumber data primer penelitian berasal dari wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder berasal dari peraturan dan berkas — berkas terkait pelaksanaan program. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik kondensasi data, dilanjutkan tahap penyajian dan terakhir verifikasi dalam bentuk tabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program jalin matra pfk telah diterima oleh enam puluh lima orang kepala rumah tangga perempuan (krtp) dengan jenis realisasi usaha berupa ternak, pedagang, penjahit, dan tukang pijat. Pelaksanaan program sendiri dilapangan masih belum efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, walaupun pada beberapa kasus terjadi peningkatan penghasilan namun bantuan masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal serta akses pemasaran terhadap produk hasil usaha krtp yang susah. Interaksi antara pelaksana program dan krtp terjalin intensif hanya sebelum mendapatkan bantuan, setelah proses penyerahan tidak ada interaksi yang terjadi. Selain itu jumlah bantuan masih belum cukup untuk memutus rantai kemiskinan. Kegiatan yang dilakukan juga sangat minim partisipasi dari kelompok sasaran, bahkan saat laporan pertanggungjawaban tidak ada krtp penerima yang datang dalam forum. Selain itu peneliti juga menemukan adanya konflik yang terjadi antara pihak desa dan lsm terkait realisasi bantuan, konflik tersebut berdampak pada pelaksanaan pelatihan yang tertunda dan membuat krtp penerima bantuan trauma dikarenakan beberapa krtp harus datang ke kantor polisi untuk menjadi saksi terkait permasalahan ini. Namun sangat disayangkan, adanya konflik ini tidak membuat ruang terbuka yang sehat antara dua belah pihak (pelaksana dan krtp). Peneliti menemukan tidak ada upaya untuk klarifikasi dan menjelaskan peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Di Desa Sumberdawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

- 1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
- 4. Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
- 5. Drs. Anwar, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selalu memberikan pemahaman, saran, kritik dan masukan kepada penulis terkait penelitian dan penyusunan skripsi ini;
- 6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini;
- 7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

- 8. Seluruh informan mulai dari pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo, pegawai Kecamatan Maron, perangkat desa di Desa Sumberdawe, Para Pendamping dan para ibu ibu penerima program jalin matra pfk di desa Sumberdawe;
- 9. Bapak Nur Hasanudin, Ibu Sri Susilowati, kakak tersayang Gatot Wahyu Tirto, Om Toha Rijanto, Tante Nurul yang selalu mendoakan, memberi semangat dan bantuan kepada penulis selama kuliah;
- 10. Untuk Rahasia Negara (Dini, Tithis, Linda, Moza, Dyas, Hesty, Tyas, dan Tomi) yang telah menjadi teman melepas penat selama penulis kuliah;
- 11. Untuk Tessa dan Reza yang telah menjadi partner makan dan diskusi berbagai hal selama penulis kuliah;
- 12. Untuk Muhammad Wahyudi, Mohamad Rofiqi, Afriansyah Adi Susilo, Fery Oktavian yang telah banyak membantu belajar tentang musik selama di PSM, hingga hal hal sederhana dan lucu selama penulis kuliah;
- 13. Untuk Siti Sundari, Shavira Rossa, Eryka Firda, Novitasari, Rivki Tri Agustin, Yasinta Widya, Nur Qoriah, dan Nur Diana Pratiwi yang banyak penulis repotkan selama di jember, baik saat sedang sakit, opname, kekurangan uang, mencari sahur, urusan organisasi dan lain lain;
- 14. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan 2015 yang telah memberikan kenangan yang berkesan selama penulis kuliah;
- 15. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Jember, 10 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN	viii
PRAKATA	X
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kebijakan Publik	
2.2 Evaluasi Kebijakan Publik	17
2.2.1 Jenis-Jenis Evaluasi Kebijakan	18
2.2.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan	19
2.2.3 Pendekatan Evaluasi Kebijakan	21
2.2.4 Karakteristik Evaluasi Kebijakan	24
2.3 Feminisasi Kemiskinan	25
2.4 Program	26

2.5 Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskir	nan 2'	7
2.6 Penelitian Terdahulu	3	1
2.7 Kerangka Berfikir		4
BAB 3. METODE PENELITIAN		5
3.1 Pendekatan Penelitian	3	6
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	3	6
3.3 Situasi Sosial		7
3.4 Desain Penelitian		9
3.4.1 Fokus Penelitian	39	9
3.4.2 Penentuan Informan Penelitian	4	0
3.4.3 Data dan Sumber Data	4	1
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	4	4
3.5.1 Teknik Pengamatan atau Observasi	4	4
3.5.2 Teknik Wawancara	4	5
3.5.3 Teknik Dokumentasi	4	6
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	4	6
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data	4	8
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	5	0
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	5	0
4.1.1 Sejarah Desa Sumberdawe	50	0
4.1.2 Kondisi Geografis Desa	5	1
4.1.3 Lokasi atau Orbitasi Desa Sumberdawe	5	3
4.1.4 Kondisi Demografi Desa Sumberdawe	5	3
4.1.5 Potensi Desa	5	4
4.1.6 Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTE	(X) Pemerintah De	esa
Sumberdawe	54	4
4.2 Deskripsi Informan Penelitian		
4.3 Penyajian Hasil Penelitian	5	7
4.3.1 Program PFK di Kabupaten Probolinggo	5	7
4.3.2 Deskripsi Program PFK di Desa Sumberdav	we 6	2
4.3.3 Pelaksanaan Program PFK di Desa Sumbero	dawe 6	6

	4.3.4 Efektifitas Program PFK di Desa Sumberdawe	92
	4.3.5 Efisiensi Program PFK di Desa Sumberdawe	10
	4.3.6 Kecukupan Program PFK di Desa Sumberdawe	10
	4.3.7 Perataan Program PFK di Desa Sumberdawe	10
	4.3.8 Responsivitas Program PFK di Desa Sumberdawe	10
	4.3.9 Ketepatan Program PFK di Desa Sumberdawe	11
4.4	Analisis Hasil Penelitian	11
	4.4.1 Analisis Proses Pelaksanaan Program	11
	4.4.2 Analisis Efektifitas Program	11
	4.4.3 Analisis Efisiensi Program	1.
	4.4.4 Analisis Kecukupan Program	1
	4.4.5 Analisis Perataan Program	1
	4.4.6 Analisis Responsivitas Program	1
	4.4.7 Analisis Ketepatan Program	1
BAB 5. PE	NUTUP	1
5.1	Kesimpulan	1
5.2	Saran	1
DAFTAR I	PUSTAKA	12
LAMPIRA	N	12

DAFTAR DIAGRAM

1	Halaman
1.1 Jumlah Individu menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin	
dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Jawa Timur	. 3
1.2 Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dengan	
status kesejahteraan 10% Terendah (Desil 1) di Jawa Timur	. 6
1.3 Jumlah KRTP Penerima Program di Kecamatan Maron tahun	
2018	. 8
4.1 Realisasi Bantuan Program Jalin Matra PFK Kabupaten	
Probolinggo tahun 2018	. 60
4.2 Realisasi Usaha KRTP	. 64

DAFTAR GAMBAR

I	Halamar
2.1 Siklus Kebijakan Publik	. 15
2.2 Kerangka Berfikir	. 34
4.1 Peta Desa Sumberdawe	. 52
4.2 Struktur Perangkat Desa Sumberdawe	. 55
4.3 Gambar Organisasi Struktural Progam PFK desa Sumberdawe	. 63

DAFTAR TABEL

На	laman		
1.1 Sebaran penerima program Jalin Matra PFK tingkat kecamatan mulai			
tahun 2014 – 2018	7		
1.2 Jumlah Individu Yang Tidak Bekerja menurut Kelompok Usia dengan			
Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kab. Probolinggo	8		
2.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan	19		
2.2 Komparasi Model Evaluasi Kebijakan	23		
2.3 Penelitian Terdahulu	32		
3.1 Hasil Data Primer Penelitian	42		
3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	47		
4.1 Lokasi atau Orbitasi Desa	53		
4.2 Jumlah Penduduk Desa Sumberdawe Berdasarkan Usia	53		
4.3 Sebaran KRTP Penerima Bantuan Tahun 2014 – 2018	58		
4.4 Jadwal Pelaksanaan Program PFK di Desa Sumberdawe			
4.5 Pelaksanaan Kegiatan Rembug Warga			
4.6 Pelaksanaan Kegiatan Klarifikasi Kebutuhan			
4.7 Pelaksanaan Kegiatan Rembug Pokmas			
4.8 Pelaksanaan Rembug Pertanggungjawaban	90		
4.9 Peningkatan Pendapatan Penerima Bantuan Jalin Matra PFK	97		
4.10 Temuan peneliri terkait efektivitas program	101		
4.11 Temuan Peneliti terkait efisiensi program	103		
4.12 Rincian Anggaran Kegiatan Program Jalin Matra PFK di desa			
Sumberdawe	104		

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman				
Lampiran A	Pedoman Wawancara	124			
Lampiran B	Pedoman Wawancara				
Lampiran C	Pedoman Wawancara				
Lampiran D	Surat Keputusan Kades Sumberdawe terkait program				
	jalin matra PFK	127			
Lampiran E	Surat Ketetapan Kades Terkait Penerima Bantuan	129			
Lampiran F	Berita Acara Rembug Warga	131			
Lampiran G	Berita Acara Rembug Pertanggungjawaban				
Lampiran H	Daftrar Hadir Rembug Warga				
Lampiran I	Laporan Keuangan Program				
Lampiran J	Berita Acara Penyerahan Bantuan				
Lampiran K	Dokumentasi Penyerahan Bantuan	171			
Lampiran L	Dokumentasi Wawancara	174			
Lampiran M	Surat Izin Penelitian dari LP2M Universitas Jember				
Lampiran N	Surat Izin Penelitian BAKESBANGPOL Kabupaten				
	Probolinggo	181			
Lampiran O	Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 Tentang				
	Pedoman Umum Program Jalin Matra PFK	182			

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 tentang Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera atau yang disingkat program Jalin Matra merupakan inovasi dari pemerintah provinsi Jawa Timur dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengatasi masalah kemiskinan. Program jalin matra sendiri terbagi menjadi tiga sub program, diantaranya adalah program jalin matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), program jalin matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dan program jalin matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK). Program – Program tersebut memiliki sasaran yang berbeda – beda, untuk program jalin matra PFK sasarannya ialah kepala rumah tangga perempuan (KRTP) yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan tantangan besar yang dihadapi negara – negara dari masa ke masa, tak terkecuali negara - negara maju dan berkembang seperti Indonesia. Seperti yang dikatakan Suhariyanto sebagai kepala Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwa masalah kemiskinan harus jadi fokus utama dan prioritas pemerintah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui formulasi kebijakan atau program yang inovatif dalam satu periode pemerintahan tertentu, baik untuk jangka waktu pendek, menengah dan atau panjang (ekonomi.kompas.com)

Beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut diantaranya ialah *pertama*, ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dari pengeluaran ekonomi. *Kedua*, kesenjangan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah yang diukur dengan angka rasio gini. *Ketiga*, ketimpangan antara penduduk yang tinggal di kota dan di desa. *Keempat*, kurang stabilnya harga kebutuhan pokok dan energi (bbc.com)

Upaya pengentasan persoalan kemiskinan tersebut telah dilakukan oleh Negara — Negara didunia, mulai dari kesepakatan akan adanya *Millineum Development Goals* hingga dewasa ini telah sampai pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengentasan segala bentuk kemiskinan menjadi poin utama dalam era pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang mana didalamnya memuat beberapa target diantaranya yakni pengurangan setidaknya separuh jumlah penduduk miskin, memastikan semua penduduk utamanya penduduk miskin untuk mendapatkan hak setara terhadap sumber ekonomi dan teknologi, perlindungan social yang pasti bagi seluruh level masyarakat, serta membuat kerangka kerja kebijakan yang ramah terhadap gender.

Adanya upaya pengentasan kemiskinan yang ramah terhadap gender dalam poin *Sustainable Development Goals* (SDGs) tersebut merupakan langkah konkret penerapan *gender mainstreaming* (pengarusutamaan gender) bagi Negara – Negara di dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Pengarusutamaan gender sendiri kurang lebih menurut (Shirin, 2003:16) adalah strategi pemerintah dalam upaya memikirkan dan merumuskan bagaimana implikasi perempuan dan laki – laki jika sama – sama dilibatkan dalam segala tindakan – tindakan yang direncanakan, termasuk didalamnya ialah undang – undang, kebijakan, dan program di segala level tingkatan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk mensetarakan posisi perempuan dan laki laki serta melebur stuktur – struktur ketidaksetaraan yang terjadi selama ini. Sehingga perempuan juga mendapatkan manfaat yang sama, dan ketimpangan gender di berbagai level kehidupan dapat berkurang.

Pelaksanaan pengentasan terkait kemiskinan dan pembangunan tersebut tidak serta menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Namun juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, salah satunya ialah provinsi jawa timur. Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah provinsi jawa barat, yang berjumlah kurang lebih sekitar 39.744.800 juta jiwa penduduk pada tahun 2019. Hal tersebut dapat menjadi perhatian khusus mengingat dalam kurun waktu 2010 sampai 2019, jumlah penduduk provinsi jawa timur meningkat sebesar 2.263.200 juta jiwa. Dengan komposisi 20.125.600 juta penduduk perempuan dan 19.619.200 juta penduduk laki – laki, atau bisa dikatakan 50,64 persen penduduk jawa timur adalah perempuan (katadata.id). Lebih lanjut lagi, Khofifah selaku gubernur terpilih periode 2019 – 2024 menjelaskan bahwa kemiskinan di pedesaan adalah masalah yang akut di daerahnya. Apalagi ditambah dengan ketimpangan yang terjadi antara daerah jawa timur sebelah utara dan selatan (cnnindonesia.com).

Diagram 1.1 Jumlah Individu menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Jawa Timur



Sumber: Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (bdt.tnp2k.go.id)

Berdasarkan data tersebut penduduk jawa timur yang berjenis kelamin laki — laki dengan status kesejahteraan 40% terendah berjumlah total 6.528.056 juta jiwa, sedangkan untuk perempuan berjumlah 6.680.452 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan masih mendominasi sebagai individu

dengan kesejahteraan yang kurang di jawa timur. Dibuktikan dengan tingginya jumlah perempuan dibandingkan laki – laki yang hidup kurang mampu pada usia 45 tahun keatas.

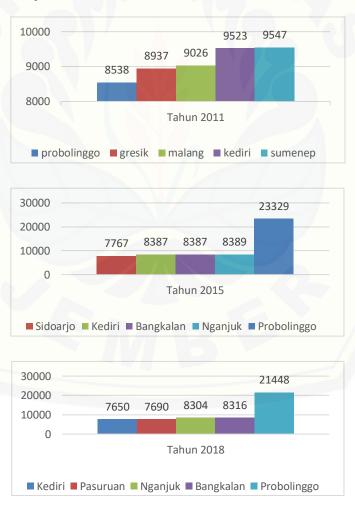
Tingginya angka perempuan di jawa timur yang hidup dibawah garis kemiskinan merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi jawa timur, mengingat masalah kemiskinan juga tidak terlepas dari isu keperempuanan, khususnya perempuan yang berada di wilayah pedesaan (jurnalperempuan.go.id). Menurut data dari *United Nation Women*, secara umum 1 dari 5 perempuan hidup didalam keluarga yang memiliki penghasilan dibawah 1,9 dolar per-hari, dan pada kisaran umur 25 sampai 34 tahun, kemiskinan lebih rentan menimpa perempuan dibandingkan laki – laki (unwomen.org). Ibu Sri Mulyani selaku menteri ekonomi dalam acara "Voyage to Indonesia's Seminar on Women's Participation for Economic Inclusiveness" juga menyampaikan bahwa ketidaksetaraan gender memiliki keterkaitan dengan masalah kemiskinan. Ketidaksetaraan tersebut bisa berupa ketidaksetaraan akses pendidikan, kesehatan, dan dunia kerja (liputan6.com).

Salah satu kesenjangan lain yang nampak yakni pada tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Berdasarkan data yang dihimpun oleh (tirto.id) tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada agustus 2018 tercatat sebesar 82,69 persen untuk laki - laki dan 51,88 persen untuk perempuan. Begitu pula di jawa timur, Teguh Pramono selaku ketua BPS jawa timur memaparkan bahwa pada Februari 2019 TPAK laki – laki di jawa timur tercatat sebesar 83,84 persen. Sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 56,79% (kominfo.jatimprov.go)

Selain terjadi perbedaan dalam hal partisipasi kerja, masalah lain terkait kemiskinan dan keperempuanan di provinsi jawa timur ialah banyaknya kepala rumah tangga perempuan (KRTP). Berdasarkan Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinina (TNP2K) jumlah kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan status kesejahteraan 40% terendah di Jawa Timur sebanyak 990.903 ribu jiwa atau sekitar 22,6% dari 4.374.535 KRTP secara

nasional. Hal tersebut menempatkan jawa timur sebagai provinsi terbanyak pertama terkait permasalahan kepala rumah tangga perempuan (KRTP) 40% terendah kesejahteraannya, disusul jawa barat dengan 796.183 KRTP kemudian jawa tengah sebanyak 780.811 KRTP dan sumatera utara sejumlah 185.190 KRTP (bdt.tnp2k.go.id). Atas dasar permasalahan tersebut pemerintah provinsi jawa timur dibawah naungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa merancang program khusus bagi kepala rumah tangga perempuan (KRTP) yang berpedoman pada data terkait kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan status kesejahteraan sepuluh persen terendah (desil 1).

Diagram 1.2 Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dengan status kesejahteraan 10% Terendah (Desil 1) di Jawa Timur



Sumber: Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Probolinggo

Diagram tersebut memaparkan perkembangan jumlah kepala rumah tangga perempuan (KRTP) desil 1 di jawa timur secara berkala dari tahun 2011 sampai 2018. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 dan Program Penanganan Fakir Miskin (PFM) tahun 2015 serta 2018 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Seperti yang dijabarkan pada diagram, bahwa pada tahun 2011 jumlah KRTP desil 1 terbanyak berada di kabupaten Sumenep dengan jumlah 9547 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2015 sampai 2018 kabupaten Probolinggo masih tetap menempati posisi pertama dengan jumlah 23329 KRTP di tahun 2015 dan 21448 KRTP di tahun 2018.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka sasaran program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) tahun 2018 menempatkan probolinggo sebagai daerah dengan kelompok penerima program paling banyak yakni sejumlah 1998 KRTP dan diimplementasikan di 52 desa serta ditunjang dengan bantuan keuangan khusus kabupaten sejumlah 75.000.000 juta rupiah. Hal tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait evaluasi program jalin matra PFK di kabupaten probolinggo.

Tabel 1.1 Sebaran penerima program Jalin Matra PFK tingkat kecamatan mulai tahun 2014 - 2018

No.	Kecamatan	Jumlah KRTP Penerima Program			ram			
		KRTP dengan status kesejahtaan 40% terendah	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	Maron	2970 KRTP	82	41	20		227	370
2	Paiton	2742 KRTP	20	1	1	269	-	289
3	Tongas	2584 KRTP	70	39	-	726	-	835
4	Banyuanyar	2275 KRTP	-	44	175	-	82	301
5	Gading	2074 KRTP	60	34	4	-	240	334

Sumber: Jaringan Ritel Kelompok Usaha Sedulur Cilik (JARIK LURIK)

Berdasarkan tabel tersebut kecamatan maron sejak tahun 2014 sampai 2018 selalu mendapatkan program jalin matra PFK, hanya pada tahun 2017 saja kecamatan maron tidak menerima. Lebih lanjut lagi, kecamatan maron memiliki jumlah. KRTP dengan status kesejahteraan 40% terendah di kabupaten Probolinggo, yakni sejumlah 2970 KRTP.

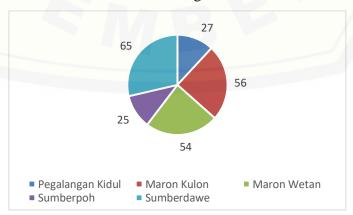
Tabel 1.2 Jumlah Individu Yang Tidak Bekerja menurut Kelompok Usia dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kab. Probolinggo

No.	Kecamatan	Jumlah Individu Tidak Bekerja
1	Tiris	28.318
2	Krucil	28.317
3	Maron	27.681
4	Tongas	21.695
5	Gading	19.997

Sumber: Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Probolinggo

Berdasarkan tabel tersebut kecamatan maron menempati urutan ketiga teratas se kabupaten terkait jumal individu yang tidak bekerja, dan dua wilayah tertinggi lainnya ialah kecamatan tiris dan krucil, dimana tiga kecamatan tersebut merupakan daerah probolinggo atas yang kondisi geografis dan potensi wilayahnya kurang lebih cukup sama satu dan lainnya. Berdasarkan tingginya kepala rumah tangga miskin dan jumlah individu yang tidak bekerja, maka penulis tertarik untuk meneliti evaluasi program Jalin Matra PFK di kecamatan maron.

Diagram 1.3 Jumlah KRTP Penerima Program di Kecamatan Maron tahun 2018



Sumber: Jaringan Ritel Kelompok Usaha Sedulur Cilik (JARIK LURIK)

Grafik tersebut memaparkan bahwa desa penerima program jalin matra PFK di kecamatan maron pada tahun 2018 berjumlah 5 desa. Desa Sumberdawe memiliki jumlah kepala rumah tangga perempuan (KRTP) sasaran terbanyak, yakni sejumlah 65 KRTP. Sementara desa sumberpoh memiliki jumlah kepala rumah tangga perempuan (KRTP) sasaran terendah, yaitu sebanyak 25 KRTP. Maka berdasarkan data tersebut peneliti memilih fokus lokasi penelitian di desa Sumberdawe, kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Dengan harapan, peneliti dapat mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana program tersebut menyentuh kelompok sasaran dan dampaknya sejauh mana terhadap peningkatan kesejahteraan kepala rumah tangga perempuan (KRTP).

1.2 Rumusan Masalah

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2013:93) menjelaskan bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya yang dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Sugiyono (2013:32) menyampaikan bahwa masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar – benar terjadi, penyimpangan antara teori dengan praktik, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, dan penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Evaluasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo?"

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:290) tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Moleong (2013:81) menjelaskan tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistic dan memperbanyak pemahaman mendalam. Berdasarkan definisi tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memperoleh informasi perihal Evaluasi Program Jalin Matra Penanggulangan

Feminisasi Kemiskinan di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Jember (2012:21), manfaat penelitian disebut juga signifikasi penelitian. Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang penulis paparkan diatas, manfaat yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat secara pribadi, yakni dapat melatih penajaman penalaran keilmuan dengan menerapankan ilmu, teori, dan wawasan selama perkuliahan didalam sebuah fenomena tertentu yang nantinya akan memberikan pengalaman bagi peneliti untuk dapat mengomparasikan kondisi ideal dalam perkuliahan dengan kondisi sesungguhnya yang ada di tempat penelitian.
- b. Manfaat secara akademis, yaitu peneliti dapat memberikan sumbangsih keilmuan berupa data, informasi, dan wawasan secara konseptual serta teoritis terkait Evaluasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.
- c. Manfaat secara praktis, yakni peneliti melalui hasil penelitian dapat memberikan masukan – masukan yang positif dan konstruktif terhadap pihak yang terkait dalam pelaksanaan program jalin matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, khususnya di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan secara umum bagi pemerintah provinsi jawa timur.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Raco (2013:104) menjelaskan bahwa tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide – ide, pendapat, dan kritik tentang topik yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuan sebelumnya. Tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti.

Selain itu, buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah universitas jember (2016:39), tinjauan pustaka memuat teori, hasil – hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian – kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Berdasarkan penjelasan tersebut, tinjauan pusataka ialah modal peneliti secara keilmuan untuk membantu dan memudahkan analisis pada sebuah penelitian tertentu yang berupa teori, konsep, hasil penelitian terdahulu yang linear dengan topik yang akan diteliti, serta kerangka berfikir yang digunakan untuk membangun logika berfikir dalam membangun dan mensinergiskan konsep – konsep yang menjadi sebuah dasar penelitian. Adapun konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1. Kebijakan Publik
- 2. Evaluasi Kebijakan Publik
- 3. Feminisasi Kemiskinan
- 4. Program
- 5. Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan
- 6. Penelitian Terdahulu
- 7. Kerangka Berfikir

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2017:39), secara sederhana kebijakan publik dapat dikatakan bahwa kebijakan public adalah "...setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara. Kebijakan public adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita – citakan".

Selanjutnya menurut Charles O. Jones dalam Winarno (2014:19), istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal dan *grand design*.

Thomas R Dye yang dikutip dalam Inu Kencana (2010:105), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do).

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah. Setiap kebijakan

yang dibuat pemerintah pasti mempunyai suatu tujuan tertentu, baik dalam jangka waktu pendek atau panjang. Fungsinya untuk memecahkan masalah atau problem yang terjadi dalam masyarakat, sekaligus sebagai wujud hadirnya pemerintah sebagai alat pelayanan publik disegala lini kehidupan.

2.1.2 Bentuk Kebijakan Publik

Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2. Tap MPR.
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4. Peraturan Pemerintah.
- 5. Peraturan Presiden.
- 6. Peraturan Daerah Provinsi.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau kota.

Adanya hierarkis undang – undang tersebut berguna agar setiap produk hukum kebijakan yang ada tidak saling tumpang tindih dan saling berkesinambungan. Sehingga kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak terkait baik berupa program, bantuan, dan lain – lain dapat berjalan maksimal, baik secara *top down* atau *bottom up*.

Nugroho (2017:127) menyederhanakan bentuk kebijakan publik dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yang lazim diterima mencakup UUD, Tap MPR, UU/Perpu,
- b. Kebijakan publik yang bersifat *messo* atau menengah, atau penjelas pelaksanaan, yang lazim diterima mencakup PP dan Perpres kebijakan,
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya yang lazim diterima mencakup Perda - Perda.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera atau disingkat Jalin Matra, yang didala mnya termuat program penaggulangan feminisasi kemiskinan atau disingkat PFK, merupakan kebijakan publik yang

bersifat *messo* (menengah) atau disebut juga sebagai kebijakan penjelas dan atau pelaksana. Terkait hal tersebut, kebijakan tersebut dikeluarkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan program jalin matra PFK di lapangan.

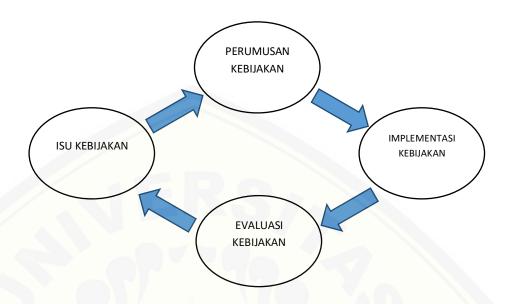
2.1.3 Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Prof. Dr. A. Hoogerwerf dalam Setyodarmodjo (2003:82) menjelaskan ada beberapa tujuan kebijakan publik, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1. Memelihara ketertiban umum
- 2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang atau stimulator)
- 3. Menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)
- 4. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi atau alokator)

Berdasarkan penjelasan tersebut program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan termasuk dalam tujuan kebijakan yang melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang atau stimulator), yakni melalui pemberian bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.00,00 (dua juta lima ratus) untuk kepala rumah tangga perempuan (KRTP) sasaran.

2.1.4 Mekanisme Kebijakan Publik



Gambar 2.1 Siklus Kebijakan Publik Sumber : (Nugroho 2017:229)

Berdasarkan gambar yang dipaparkan tersebut, siklus atau mekanisme kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Isu Kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar dan yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan orang seorang dan harus diselesaikan. Isu tersebut diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan sendiri terdiri dari dua jenis yakni problem (masalah) dan *goal* (tujuan). Yang dimaksud ialah kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada masyarakat atau publik, dan dapat pula berorientasi pada *goal* atau tujuan yang hendak dicapai.
- 2. Lalu, isu kebijakan yang diangkat sebagai agenda politik tersebut menggerakkan pemerintah untuk merumuskan atau memformulasikan kebijakan publik guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan atau *goal* (tujuan) yang ingin dicapai. Rumusan kebijakan publik tersebut akan

- menjadi produk hukum bagi negara dan warganya, termasuk pimpinan negara.
- 3. Kemudian, kebijakan publik yang telah dirumuskan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur yang ada baik oleh pemerintah atau masyarakat, maupun pemerintah dan masyarakat.
- 4. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut bermuara pada output, dapat berupa manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh sasaran kebijakan.
- 5. Dalam jangka waktu panjang, kebijakan yang dilaksanakan tersebut akan menghasilkan *outcome* dan *impact*, yang dapat berupa dampak yang diharapkan (*intended impact*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended impact*).

Berdasarkan pemaparan tersebut, fokus penelitian yang ingin peneliti lakukan di lapangan adalah evaluasi kebijakan. Mengingat program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan merupakan rencana jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi jawa timur tahun 2014 – 2019, dan masih dilanjutkan oleh gubernur terpilih khofifah sebagai *continuity* pengentasan kemiskinan (detik.com). Oleh karena itu, peneliti berharap dapat menemukan wawasan baru terkait *outcome* dan *impact* yang dirasakan oleh kepala rumah tangga perempuan (KRTP) sasaran di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Serta peneliti dapat mengetahui dan memaparkan apakah program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan di desa Sumberdawe sudah berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra), diantaranya yakni program tepat sasara, tepat jumlah, tepat pemanfaatan, dan tepat administrasi.

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

William Dunn (2003:358) memaparkan jika istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (rating), dan penilaian (*assessment*), yang berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dana tau hasil kebijakan. Riant nugroho (2003:183) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, serta untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan publik tercapai.

Islamy (2009:112) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan atau penilaian kebijakan merupakan langkah terakhir dalam suatu proses kebijakan. Penilaian kebijakan tersebut mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Menurut Leister dan Stewart dalam Winarno (2014:229), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. *Tugas pertama* adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. *Tugas kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan *standard* atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dye (2008:547) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yangobjektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publikterhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185) menyampaikan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian – sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan sebuah tahap dari siklus kebijakan publik yang berguna untuk menilai secara obyektif tentang sejauh mana sebuah kebijakan dapat memberikan dampak bagi penyelesaian masalah – masalah publik.

2.2.1 Jenis – Jenis Evaluasi Kebijakan

Winarno (2008:235) menjelasakan 3 jenis evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur suatu program atau kebijakan, diantaranya sebagai berikut.

- Tahap Perencanaan (Ex-Ante Evaluation), Tahap perencanaan dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dan berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi jenis ini dimaksudkan untuk mengetahui layak tidaknya suatu kebijakan atau program untuk diimplementasikan. Evaluasi ini dilakukan sebelum kebijakan atau program diimplementasikan.
- 2. Tahap Pelaksanaan (On-Going Evaluation), Evaluasi jenis ini dilakukan pada waktu kebijakan atau program sedang berjalan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan apakah keluaran kebijakan sampai pada kelompok sasaran dengan tepat, seperti tepat waktu pelaksanaan sesuai yang dijadwalkan, tepat sasaran seperti yang digariskan dalam dokumen kebijakan dan tepat jumlah atau volume output yang harus diterima kelompok sasaran.
- 3. Tahap Pasca-Pelaksanaan (Ex-Post Evaluation), Tahap pasca pelaksanaan dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berkahir. Tahap ini bertujuan untuk melihat apakah pencapain (*output/outcome/impact*) program mampu mengatasi masalah yang ingin dipecahkan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti ingin memfokuskan pada *On Going Evaluation*, dengan rasionalisasi bahwa program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan masih terlaksana sampai kepemimpinan ibu khofifah. Dengan harapan, peneliti dapat memberikan penilaian atas penerapan program secara obyektif dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 lampiran kedua tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra).

2.2.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah Hasil yang dilakukan telah tercapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang Unit Biaya	
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang di inginkan memecahkan masalah?	tipe I) Efektifitas Tetap
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Koldor-Hicks Kriteria
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskankebutuhan, prefensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei dengan warga Negara
Ketepatan	Apakah Hasil yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai?	Progam Publik harus merata dan bernilai.

Sumber: Pengantar Analisis kebijakan Publik, William N.Dunn, 2003: 610

1. Efektivitas

William N. Dunn (2003:429) menyatakan bahwa efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di desa sumberdawe, peneliti memahami bahwa efektivitas program jalin matra pfk ialah tentang bagaimana tujuan dan sasaran program dapat tercapai. Tujuan tersebut peneliti uraikan menjadi empat point sederhana yakni interaksi antara kader pkk desa denggan penerima

program, akses usaha, ketahanan ekonomi, dan peningkatan motivasi usaha dan skill krtp.

2. Efisiensi

William Dunn (2003:430)berpendapat bahwa efisiensi (efficiency)berkenaan dengan jumlah usaha dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di desa sumberdawe, peneliti memahami bahwa efisiensi program jalin matra pfk ialah tentang bagaimana pelaksanaan dilapangan dapat sesuai dengan pedoman umum yang ada baik dari segi timeline kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan.

3. Kecukupan

William N. Dunn(2003:430) menyampaikan bahwa kecukupan (*adequacy*) berarti seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kecukupan memiliki hubungan dengan efektivitas yang memprediksi jauh tidaknya alternatif – alternative kebijakan yang ada, dapat memuaskan kebutuhan,nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat atau publik. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di desa sumberdawe peneliti memahami bahwa kecukupan program jalin matra pfk ialah tentang bagaimana bantuan senilai dua juta lima ratus ribu rupiah sudah membantu mengkatalisator usaha atau bisnis para penerima atau belum.

4. Perataan

William N.Dunn (2003:434) menyatakan bahwa kriteria perataan (*equity*)erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok

yang berbeda dalam masyarakat. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di desa sumberdawe, peneliti memahami bahwa perataan program jalin matra pfk ialah tentang bagaimana bantuan dapat terdistribusi secara menyeluruh secara obyketif.

5. Responsivitas

William N. Dunn (2003:437) berpendapat bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di desa sumberdawe, peneliti memahami bahwa responsivitas program jalin matra pfk ialah tentang bagaimana bantuan dapat membantu mengangkat keadaan ekonomi krtp.

6. Ketepatan

N. William Dunn (2003:499)menyatakan bahwa kelayakan(Appropriateness) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di desa sumberdawe, peneliti memahami bahwa ketepatan program jalin matra pfk ialah tentang bagaimana bantuan dapat terdistribusi secara tepat sesuai dengan pedoman umum yang ada yakni tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat dan tepat sasaran.

2.2.3 Pendekatan Evaluasi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan evaluasi formal. Evaluasi formal merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut dengan dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dalam evaluasi formal adalah

bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal dan itu merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam evaluasi formal menggunakan undang – undang, dokumen – dokumen program dan wawancara dengan pembuat kebijakan serta administrator guna mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan.

Evaluasi formatif juga terdapat dua macam yaitu evaluasi perkembangan dan evaluasi proses retrospektif. Penelitian ini menggunakan evaluasi proses retrospektif karena pada evaluasi proses retrospektif cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan program. Evaluasi proses retrospektif cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi kebijakan dan program.

Tabel 2.2 Komparasi Model Evaluasi Kebijakan

Pendekat an	Tujuan	Asumsi	Bentuk-Bentuk Utama	Teknik
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversional	 a. Eksperimental sosial b. Akuntansi system sosial c. Pemeriksaan sosial d. Sintesis riset dan praktik 	 Sajian grafik Tampilan Tabel Angka indeks Analisis seri waktu terinterupsi Analisis seri terkontrol Analisis diskontinyuregresi
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	a. Evaluasi perkembangan b. Evaluasi eksperimental c. Evaluasi proses retrospektif (ex-post) d. Evaluasi hasil retrospektif	 Pemetaan sasaran Klarifikasi nilai Kritik nilai Pemetaan hambatan Analisis dampak silang Discounting
Evaluasi Keputusa n Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dab valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	a. Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi b. Analisis utilitas multiatribut	 Brainstorming Analisis argumentasi Delphi kebijakan Analisis survai pemakai

Sumber : Nugroho (2017:325)

2.2.4 Karakteristik Evaluasi Kebijakan

William Dunn (1999:608) memaparkan beberapa karakteristik yang membedakan evaluasi kebijakan dengan tahap atau siklus kebijakan publik yang lainnya. Berikut penjabarannya:

- 1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuantujuan dan sasaran.
- 2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai". Kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat, sehingga harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.
- 3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, daripada hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksiaksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
- 4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi

dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain).

2.3 Feminisasi Kemiskinan

Diana Pearce (1978) dalam (Bullock, 2013:2) memaparkan bahwa feminisasi kemiskinan adalah gambaran tidak proporsional terkait tingkat kemiskinan perempuan yang lebih tinggi daripada laki – laki. Chant (2010:99) menjelaskan feminisasi kemiskinan sebagai fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang miskin dibandingkan laki – laki, serta adanya perbedaan tingkat kemiskinan antara rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dengan rumah tangga yang dikepalai laki – laki saja dan atau kepala rumah tangga yang masih lengkap atau berpasangan.

Chant (2007:1) mendeskripsikan karakteristik umum feminisasi kemiskinan, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Perempuan lebih banyak mengalami insiden kemiskinan dibandingkan laki laki
- b. Perempuan lebih parah atau dalam terkait tingkat kemiskinan dibandingkan laki laki
- c. Perempuan cenderung bertahan dalam kemiskinan jauh lama dibandingkan laki laki
- d. Beban kemiskinan perempuan yang tidak proposional relatif lebih tinggi dibandingkan laki laki
- e. Perempuan menghadapi lebih banyak hambatan untuk keluar dari kemiskinan
- f. Ada hubungan antara feminisasi kemiskinan dengan masalah kemiskinan yang dialami oleh kepala rumah tangga perempuan
- g. Kepala rumah tangga perempuan bisa dikatakan yang termiskin dari yang miskin
- h. Kepala rumah tangga perempuan berpeluang menurunkan masalah kemiskinan ke anak anaknya.

Maka dari beberapa pemaparan tersebut, dapat kita tarik garis merah bahwa masalah kemiskinan yang dialami oleh kepala rumah tangga perempuan di Indonesia khususnya jawa timur bukanlah sebuah fenomena kemiskinan yang membutuhkan penanganan khusus dan tepat. Sebab feminisasi kemiskinan adalah bagian lain dari masalah kemiskinan yang juga harus dicari solusi pengentasannya seperti apa, dan program jalin matra feminisasi kemiskinan adalah salah satu solusinya.

2.4 Program

Nurcholis (2009:137) menjelaskan bahwa program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga, atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran. Charles O'Jones dalam Moenir (2001:180) memaparkan bahwa program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dengan program maka segala bentuk rencana akan terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

Sementara itu menurut Wahab (2008:28), program adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas – batasnya. Terkait program itu sendiri biasanya akan memuat serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan, pengorganisasian serta penyediaan sumber – sumber daya yang diperlukan. Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006:72) juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenisrencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantumsasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yangtelah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa program ialah intrumen penjelas sebuah kebijakan yang berisi rencana – rencana strategis dan teknis yang terorganisir dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

2.5 Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dalam upaya untuk menumbuh kembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periodepertama, maka pada pada periode kepemimpinan Pakde Karwodan Gus Ipul 2014 – 2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang diwujudkan melalui Program Jalan Lain Menuju Mandiri danSejahtera (JALIN MATRA). Program jalin matra sendiri memiliki sub program yang terbagi menjadi 3 bagian, yakni Bantuan Rumah Tangga Miskin, Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan.

2.5.4 Tujuan Program

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera, Program Jalin Matra Feminisasi Kemiskinan tersebut memiliki tujuan diantaranya ialah sebagai berikut:

- Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap kepala rumah tangga perempuan (KRTP) melalui optimalisasi peran kader Tim Penggerak PKK sebagai mother care bagi KRTP;
- 2. Memperluas akses rumah tangga sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha atau pendapatan;
- 3. Membantu mendorong ketahanan social ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar;
- 4. Mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*Life Skill*) KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya

2.5.5 Prinsip Dasar Program

a. Membantu dengan hati

Program Jalin Matra PFKpada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasarwarga miskin khususnya yang masuk kriteria KRTP agarmereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu, program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar "membantu denganhati" yangmengedepankan empati sosial, dan *social compassion*.

b. Partisipatoris Deliberatif

Pengambilan Keputusan di tingkat stakeholder dilakukan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalian masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga.

"Rembug Warga" menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan awal kondisi KRTP sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi factual.

c. Perspektif Gender

Program Jalin Matra PFK di laksanakan dengan mengintegrasikan penyadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normative biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan KRTP sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (gender role) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, aspirasi, potensi, kebutuhan, dan kearifan local dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d. Transparan dan Akuntabel

Jalin Matra PFK dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

e. Keterpaduan

Pelaksanaan Jalin Matra PFKmelibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten, PemerintahKecamatan, PemerintahDesa, Perguruan tinggi Pendamping, Tenaga Pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yangbekerja secara sinergis dan terpadu.

f. Keberlanjutan

Jalin Matra PFK pada dasarnya merupakan "stimulus" ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijagakeberlanjutannya, tidak hanya oleh KRTP sebagai pengelola usaha, namun juga melibatkan peran aktif PemerintahDaerah/Desa serta Mother Care Desa dalam upaya menjagakelestarian program. Dalam usaha untuk memutus rantai kemiskinan yang dialami oleh KRTP, maka dapat dibentukkelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi untuk mendapatkan akses yang lebih luassehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

2.5.6 Ruang Lingkup Program

Ruang lingkup Program Jalin Matra PFK diantaranya sebagai berikut:

- a. Verifikasi data kepala rumah tangga perempuan (KRTP)
- Klarifikasi dan Identifikasi kebutuhan kepala rumah tangga perempuan (KRTP)
- c. Fasilitasi bantuan kepala rumah tangga perempuan (KRTP)
- d. Peningkatan kapasitas kepala rumah tangga perempuan (KRTP)
- e. Pemberdayaan Mother Care
- f. Pendampingan program

2.5.7 Sasaran Program

Sasaran Program Jalin Matra PFK tersebut diantaranya mengacu pada basis data terpadu PPFM 2015 dengan memperhatikan data PPFM 2018. Kriteria sasaran program tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

- Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1) dari basis data terpadu PPFM 2015
- 2. Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)
- 3. KRTP yang memiliki anggota rumah tangga produktif dengan usia 15
 65 tahun dana tau KRTP sebatang kara produktif
- 4. Diprioritaskan desa dengan KRTP minimal 10 rumah tangga

2.5.8 Kriteria Penerima Program

KRTP adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Hal – hal yang menyebabkanseorang perempuan disebut sebagai KRTP antara lain:

- a. Telah bercerai;
- b. Suami meninggal;
- c. Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan);
- d. Memiliki suami yang difabel/cacat dan atau mengalami sakitmenahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif;
- e. KRTP sebatang kara usia produktif dan mampu mengelola usaha.
- f. Non Marital Single Mother

2.5.9 Indikator Keberhasilan Program

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Jalin matraPFK dilihat dari :

1. Tepat Sasaran

KRTP penerima program PFK sesuai dengan Basis DataTerpadu PPFM 2015 dengan memperhatikan data PPFM2018. dan atau KRTP

pengganti berdasarkan hasil verifikasidalam rembug warga sesuai ketentuan;

2. Tepat Jumlah

BKK kepada KRTP berupa barang sesuai daftar rincian usaha yang di susun dari hasil Identifikasi usulan kebutuhan senilai Rp. 2.500.000 (termasuk pajak);

3. Tepat Pemanfaatan

Barang yang sudah diterima KRTP telah digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha KRTP.

4. Tepat Administrasi

Dilakanakannya program Jalin Matra PFK secara tepat administrasi baik berkas pencairan dan laporan pertanggungjawaban administrasi maupun publik sesuai dengan Pedum dan PTO.

2.5.10 Lokasi Program

Lokasi Jalin Matra PFK adalah Desa Berdasarkan Basis Data Terpadu PPFM 2015 Desil 1 dengan memperhatikan data PPFM2018.

2.5.11 Anggaran Program

Anggaran Jalin Matra bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timurmelalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada PemerintahKabupaten dan Pemerintah Desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah acuan penyusuna kerangka berfikir, dengan mengacu pada penelitian sebelum – sebelumnya. Selain itu juga bisa sebagai pembanding terkait persamaan dan perbedaan apa yang dimiliki peneliti sebelumnya dengan penelitian yang sedang berlangsung. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis yang gunakan sebagai acuan atau pembanding dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	Novi Wulandari	Evaluasi Implementasi Kampung Keluarga Berencana (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung).	Berdasarkan hasil evaluasi yang menggunakan kriteria evaluasi dari william dunn, peneliti mendapatkan pelaksanaan kebijakan masih belum optimal. Ditandai dengan kurangnya tenaga PLKB dan tidak berjalannya kelompok UPPKS sehingga masyarakat tidak memiliki pekerjaan sampingan.
2	Hesty Puspaningrum	Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan Di Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.	Berdasarkan hasil evaluasi dampak yang menggunakan konsep Langbein, program membantu secara finansial tapi menyebabkan ketidakmandirian kelompok sasaran. Lebih dari itu, program juga berhasil meningkatkan status sosial penerima bantuan serta peningkatan partisipasi KRTP pada kegiatan desa.

Berdasarkan tabel 2.3 tentang penelitian terdahulu terebut, berikut penulis paparkan terkait persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya.

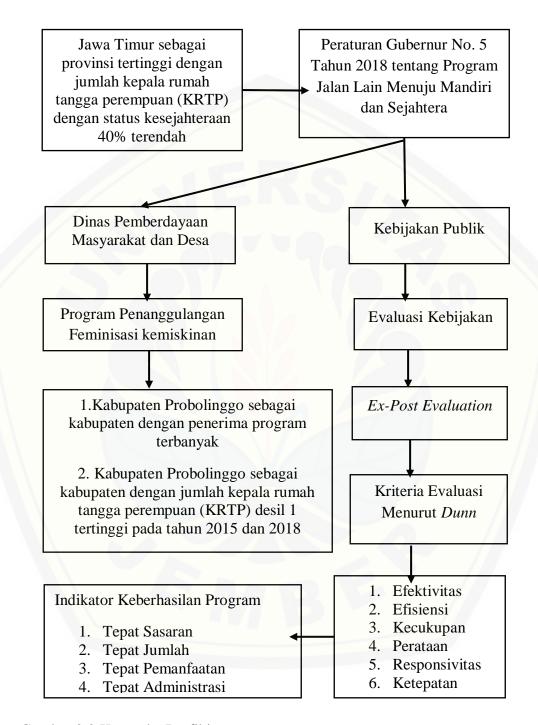
a. Persamaan Penelitian

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novi Wulandari dengan judul "Evaluasi Implementasi Kampung Keluarga Berencana(Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur KotaBandar Lampung)", penulis menemukan persamaan yakni sama sama memakai kriteria evaluasi menurut William dunn. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hesty Puspaningrum dengan judul "Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan Di Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan", penulis menemukan persamaan yaitu sama – sama membahas tentang program penanggulangan feminisasi kemiskinan.

b. Perbedaan Penelitian

- 1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novi Wulandari dengan judul "Evaluasi Implementasi Kampung Keluarga Berencana(Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur KotaBandar Lampung)", perbedaan dengan penelitian penulis saat ini ialah Novi menjadikan peserta KB aktif sebagai objek penelitian. Semetara penulis menjadikan kepala rumah tangga perempuan (KRTP) sebagai objek penelitian.
- 2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hesty Puspaningrum dengan judul "Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan Di Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan", perbedaan dengan penelitian penulis saat ini ialah lokasi penelitian. Hesty memilih kabupaten lamongan karena keberhasilan dalam menekan laju pertumubahan penduduk sementara penulis memilih kabupaten probolinggo karena jumlah KRTP desil 1 terbanyak se provinsi

2.7 Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang metode penelitian yang akan digunakan, sebagai acuan secara ilmiah terkait dengan proses menemukan data – data di lapangan dan sebagai upaya untuk menjawab rumusan maasalah. Metode penelitian sendiri merupakan hal yang wajib bagi peneliti, agar hasil – hasil penelitian dapat dirumuskan secara objektif dan empiris. Oleh karena itu, metode penelitian ditentukan oleh peneliti untuk menghindari kebingunan di lapangan serta agar peneliti mampu melakukan proses penelitian sesuai koridor keilmuannya.

Usman dan Akbar (2009:41) menjelaskan bahwa metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Ulber Silalahi (2009:12) memaparkan bahwa definisi metode ialah keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Sementara itu menurut Sugiyono (2013:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang dilakukan dengan maksud dan atau tujuan tertentu. Sedangkan Brawer dalam Bandur (2016:17) menyatakan bahwa metode penelitian adalah seperangkat aturan prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh penelitian yang valid dan reliabel.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1. Pendekatan Penelitian
- 2. Tempat dan Waktu Penelitian
- 3. Situasi Sosial
- 4. Desain Penelitian
- 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
- 6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
- 7. Teknik Penyajian dan Analisis Data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diawal, pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Moleong (2013:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan hal tersebut dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada konteks yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sugiyono (2013:8) memaparkan bahwa penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Mengacu dari beberapa pemaparan diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menguraikan secara objektif serta jelas terkait evaluasi program penanggulangan feminisasi kemiskinan di desa sumberdawe, kecamatan maron, kabupaten probolinggo.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan sebuah bagian dari metode peneletian yang penting, karena dari situlah peneliti tertarik akan fenomena yang ada untuk diteliti dalam kurun waktu tertentu. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:62) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian tersebut dilakukan yang disertai pertimbangan logis dalam penentuan lokasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian dilakukan di desa Sumberdawe, kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan kantor dinas PMD kabupaten Probolinggo.

Rasionalisasi peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

- Kecamatan Maron merupakan kecamatan tertinggi jumlah kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Probolinggo
- Kecamatan Maron selalu mendapatkan sasaran penerima program, hanya tahun 2017 saja tidak menerima.
- Kecamatan Maron merupakan kecamatan yang angka masyarakat tidak bekerja nya tinggi
- 4. Desa Sumberdawe dalam pelaksanaan tahun 2018 merupakan desa terbanyak penerima program di kecamatan maron, dengan total kepala rumah tangga perempuan (KRTP) sasaran sebanyak 65 orang.

Sujarweni (2014:73) menyatakan bahwa waktu penelitian ialah tanggal, bulan, dan tahun kegiatan penelitian tersebut dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka waktu penelitian dilakukan pada tanggal bulan desember 2019 sampai januari 2020.

3.3 Situasi Sosial

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:52) menjelaskan bahwa situasi sosial terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku/aktor dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Berdasarkan definisi tersebut, maka elemen situasi social dalam penelitian kali ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Tempat (*Place*)

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

2. Pelaku

Dalam penelitian kualitatif interaksi aktor perlu diamati secara baik, karena aktor tersebut merupakan sumber data atau informasi yang nantinya akan membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Amirin dalam Idrus (2009:91) menyampaikan bahwa interaksi aktor atau subjek penelitian merupakan sesorang atau sesuatu yang mengenainya

ingin diperoleh keterangan. Istilah subjek penelitian kualitatif disebut sebagai informan, yakni orang — orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pelaku (*actor*) dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- Fathola, selaku ketua pelaksanaan program jalin matra PFK desa Sumberdawe tahun 2018
- b. Ali Shodiqin, selaku bendahara desa Sumberdawe
- c. Sahum, selaku kepala seksi kesejahteraan masyarakat desa Sumberdawe
- d. Ibu Arofah, selaku pendamping desa program jalin matra PFK
- e. Ibu Arni, selaku penerima bantuan program jalin matra PFK
- f. Ibu Sulastri, selaku penerima bantuan program jalin matra PFK
- g. Ibu Akma, selaku penerima bantuan program jalin matra PFK
- h. Ibu Sama, selaku penerima bantuan program jalin matra PFK
- Susanti Anggraini, selaku pendamping kabupaten program jalin matra PFK untuk kecamatan maron
- j. Faisol, selaku koordinator pendamping program jalin matra PFK tingkat kabupaten Probolinggo
- k. Pak Syahrul, selaku kepala seksi pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo
- Pak Viandra, selaku Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Probolinggo

3. Aktivitas

Aktivitas yag berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Peneliti melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian
- b. Peneliti mengumpulkan informasi baik dengan wawancara atau meminta data kepada informan
- c. Peneliti melakukan penggalian data terkait evaluasi program kepada informan yang telah ditentukan.

3.4 Desain Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:52), bagian ini menetapkan peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Silalahi (2009:180) menjelaskan bahwa desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun secara sistematis sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan – pertanyaan penelitiannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Ulber Silalahi (2009:25) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang berguna untuk menjelaskan kaidah hubungan antar peristiwa, baik penjelasan asosiasi, membuat prediksi, estimasi dan proyeksi tentang gejala yang akan muncul, maupun melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan memperoleh informasi perihal Evaluasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang diteliti melalui studi kasus di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan peneliti untuk memberi batasan — batasan penelitian agar tidak terperangkap dalam penggalian informasi dan data pada hal — hal umum yang tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Moleong (2013:12) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar focus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Sehingga fokus dalam penelitian ini ialah Evaluasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, yang diteliti menggunakan kriteria evaluasi William Dunn serta dipaparkan kendala apa saja yang terjadi saat implementasi program,

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Idrus (2009:91) menyatakan bahwa subjek penelitian ialah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dalam penelitian. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2013:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya,
- Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang diteliti.
- 3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi,
- Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri,
- 5. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan pemaparan terkait informan tersebutm maka dalam penelitian ini teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Silalahi (2009:271) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau informan yang ada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Adapaun informan yang peneliti tentukan di lapangan ialah sebagai berikut:

- a. Fathola, selaku ketua pelaksanaan program jalin matra PFK desa Sumberdawe tahun 2018
- b. Ali Shodiqin, selaku bendahara desa Sumberdawe
- c. Sahum, selaku kepala seksi kesejahteraan masyarakat desa Sumberdawe
- d. Ibu Arofah, selaku pendamping desa program jalin matra PFK
- e. Ibu Sahana, selaku penerima bantuan program jalin matra PFK
- f. Ibu Sulastri, selaku penerima bantuan program jalin matra PFK

- g. Ibu Sunarmo, selaku penerima bantuan program jalin matra PFK
- h. Susanti Anggraini, selaku pendamping kabupaten program jalin matra PFK untuk kecamatan maron
- i. Faisol, selaku koordinator pendamping program jalin matra PFK tingkat kabupaten Probolinggo
- j. Pak Syahrul, selaku kepala seksi pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo
- k. Pak Viandra, selaku Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Probolinggo

3.4.3 Data dan Sumber Data

Data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, yang berguna sebagai dasar penarikan keseimpulan dan penemuan jawaban terkait rumusan masalah yang peneliti buat. Silalahi (2009:208) menjelaskan bahwa data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan hasil dari sebuah penelitian. Idrus (2009:61) mendefinisikan data sebagai segala keterangan atau informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, dan pelaku), aktivitas penelitian serta tempat yang menjadi subjek penelitian itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan data kualitatif dalam penelitian ini dengan cara menghimpun informasi dan fakta terkait evaluasi program penanggulangan feminisasi kemiskinan di desa sumberdawe dari informan serta aktor yang telah ditentukan terlebih dahulu (*purposive sampling*).

Silalahi (2009:289) menjelaskan bahwa sumber data terbagi menjadi sumber data intern yang berasal dari dalam organisasi dan sumber data ekstern yang berasal dari luar organisasi. Data ekstren sendiri masih terbagi lagi menjadi data primer dan data sekunder. Sugiyono (2013:225) menyampaikan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

a. Sumber data utama

Lofland dan lofland dalam Moleong (2013:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif meliputi kata – kata dan tindakan orang – orang yang diamati. Oleh karena itu, sumber data utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan. Berikut merupakandata primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa narasumber

Tabel 3.1 Hasil Data Primer Penelitian

Sumber Data	Data Primer yang Didapat
Fathola	 Gambaran umum pelaksanaan program Tugas dan fungsi aktor pelaksana program
	3. Tantangan dan kondisi krtp penerima program
	4. Inisiatif usaha dalam teknis pelaksanaan program
	5. Pandangan terkait keberhasilan program
Ali Chadigin	1. Sejarah Desa
Ali Shodiqin	Alur pengajuan dana atau bantuan keuangan untuk program
Sahum	1. Gambaran umum pelaksanaan program
Sanum	Tugas dan fungsi aktor pelaksana program
	3. Tantangan dan kondisi krtp penerima program
	4. Inisiatif usaha dalam teknis pelaksanaan program
	5. Pandangan terkait keberhasilan program
Arofah	Gambaran umum pelaksanaan program
	2. Tugas dan fungsi aktor pelaksana program
	3. Tantangan dan kondisi krtp penerima program
	4. Inisiatif usaha dalam teknis pelaksanaan program
	5. Pandangan terkait keberhasilan program
Arni	1. Tanggapan tentang pelaksanaan program
Arm	2. Tantangan dan kondisi sebelum dan sesudah menerima program
	Perspektif terkait keberhasilan program membantu penyelesaian masalah

Sulastri	Tanggapan tentang pelaksanaan program
	2. Tantangan dan kondisi sebelum dan sesudah menerima program
	3. Perspektif terkait keberhasilan program membantu
	penyelesaian masalah
Sama	1. Tanggapan tentang pelaksanaan program
	2. Tantangan dan kondisi sebelum dan sesudah menerima
	program 3. Perspektif terkait keberhasilan program membantu
	penyelesaian masalah
Akma	Tanggapan tentang pelaksanaan program
	2. Tantangan dan kondisi sebelum dan sesudah menerima
	program 3. Perspektif terkait keberhasilan program membantu
	penyelesaian masalah
Susanti Anggraini, S.E	 Gambaran umum pelaksanaan program Tugas dan fungsi aktor pelaksana program
	3. Tantangan dan kondisi krtp penerima program
	4. Inisiatif usaha dalam teknis pelaksanaan program
	5. Pandangan terkait keberhasilan program
Achmad Faisol, S.Ap	1. Gambaran umum pelaksanaan program
	2. Tugas dan fungsi aktor pelaksana program
	3. Tantangan dan kondisi krtp penerima program
	4. Inisiatif usaha dalam teknis pelaksanaan program
	5. Pandangan terkait keberhasilan program
Pak Syahrul	1. Gambaran umum pelaksanaan program
	2. Tugas dan fungsi aktor pelaksana program
	3. Tantangan dan kondisi krtp penerima program
	4. Tipologi kemiskinan dan masyarakat
	5. Inisiatif usaha dalam teknis pelaksanaan program6. Pandangan terkait keberhasilan program
	o. Tandangan terkait kebernasnan program
Pak Viandra	Gambaran umum pelaksanaan program
	2. Tugas dan fungsi aktor pelaksana program
	3. Tantangan dan kondisi krtp penerima program 4. Tipologi komiskinan dan masyarakat
	4. Tipologi kemiskinan dan masyarakat5. Inisiatif usaha dalam teknis pelaksanaan program
	6. Pandangan terkait keberhasilan program
0 1 1 1 1 1 1 (2020)

Sumber: data diolah (2020)

b. Sumber data tambahan

Lofland dan lofland dalam Moleong (2013:157) menyatakan bahwa sumber data tambahan diantaranya ialah sumber – sumber tertulis (buku – buku referensi, arsip, dan dokumen resmi), foto serta data statistik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dara tambahan dari media cetak atau media online, buku keilmuan yang cocok dengan penelitian, dokumen perundang – undangan terkait kebijakan program penanggulangan feminisasi kemiskinan serta data – data penunjang lainnya.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat perolehan data dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) ada empat macam, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survey atau angket. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draft wawancara, kuesioner atau alat elektronik lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan untuk alat pengumpulan data menggunakan alat perekam, draft wawancara, buku catatan, dan kamera.

3.5.1 Teknik Pengamatan atau Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2013:226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas

Faisal (1990) yang dikutip dalam Sugiyono (2011:212) mengatakan bahwa observasi dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1. observasi partisipasi (participant observation)
- 2. observasi terus terang atau tersamar
- 3. observasi tak berstruktur (*unstructyred observation*)

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menggunakan jenis observasi secara terang – terangan atau tersamar. Dengan tujuan bahwa peneliti sedari awal terjun sudah menyampaikan maksud dan tujuan penelitian guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

3.5.2 Teknik Wawancara

Moleong (2013:186) menjelaskan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sujarweni (2014:31) menyatakan bahwa wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait isu dan tema yang diangkat dalam penelitian melalui proses tanya jawab.

Sugiyono (2013:138) menjelaskan jenis – jenis wawancara sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur, dilakukan apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui pasti tentang informasi apa saja yang akan diperoleh, Pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.
- b. Wawancara tak Berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Silalahi (2009:314) menyampaikan bahwa wawancara dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu wawancara tatap muka dan telepon.

- Wawancara tatap muka, yakni wawancara yang dilakukan secara personal antara pewawancara dengan yang diwawancarai
- 2. Wawancara melalui telepon, merupakan pembicaraan antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan menggunakan telepon sebagai alat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur dengan cara tatap muka.

3.5.3 Teknik Dokumentasi

Moleong (2013:217) menjelaskan bahwa dokumentasi digunakan sebagai sumber data karena dalam dokumen terdapat banyak hal yang mendukung sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam pendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang berkaitan dengan evaluasi program penanggulangan feminisasi kemiskinan di desa sumberdawe, kecamatan maron, kabupaten probolinggo. Selain itu dokumentasi berupa foto, catatan harian saat peneliti terjun di lapangan, dan hasil rekaman proses observasi serta wawancara dapat dijadikan acuan penting dalam pembahasan masalah di penelitian ini.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Moleong (2013:320) menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data, selain digunakan untuk menyanggah balik terhadap yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan kualitatif. Lebih lanjut, keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi "positivisme" dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Kriteria Teknik Pemeriksaan Kredibilitas (derajat Perpanjangan keikutsertaan kepercayaan) Ketekunan pengamat Triangulasi Pengecekan sejawat Kecukupan referensial Kajian kasus negative Pengecekan anggota Kepastian Uraian rinci Kebergantungan Audit kebergantungan Kepastian Audit kepastian

Tabel 3.2 Teknik Pemeriksa Keabsahan Data

Sumber: Moleong (2013)

Berdasarkan table tersebut, penelitian ini mengacu pada kriteria kredibilitas data dengan menggunakan teknik pemeriksaan data berupa triangulasi. Moleong (2013:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sugiyono (2013:273) mengatakan bahwa ada beberapa jenis triangulasi, diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang valid

b. Triangulasi Teknik

Uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Uji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan pada wawancara, observasi, atau teknik lain dalam kurun waktu dan situasi yang berbeda.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber, dengan cara mengecek lagi data yang diperoleh dari informan.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Moleong (2013:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selain itu, menurut Sugiyono (2013:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit – unit, melalukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246-253) adalah sebagai berikut.

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilah, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, yang baru, dicari makna, tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehinga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yang benar akan membantu menemukan pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang telah terverifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan yang sudah dijelaskan di Bab 4 mengenai Program Jalin Matra PFK di Desa Sumberdawe dapat peneliti simpulan sudah cukup baik dalam membantu mengentaskan masalah kemiskinan berwajah perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari 6 kriteria evaluasi Dunn, yaitu sebagai berikut.

- a. Efektivitas pelaksanaan program jalin matra pfk di desa Sumberdawe belum efektif untuk menjawab permasalahan krtp. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus bantuan yang masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal, akses usaha yang minim, dan tidak ada upaya tindak lanjut dari pihak desa untuk meningkatkan skill usaha. Walaupun terjadi peningkatan penghasilan yang dirasakan oleh krtp di bidang usaha pijat dan jahit, namun bantuan terasa stagnan bagi krtp ternak dan usaha perdagangan yang terkendala soal akses terhadap pemasaran produk serta konsistensi dalam mengembangkan bantuan.
- b. Efisiensi pelaksanaan program jalin matra pfk di desa Sumberdawe disimpulkan belum efisien utamanya dari segi waktu dan tahapan tahapan yang dilakukan selama program berlangsung tidak mendapatkan partisipasi yang tinggi dari penerima dan ada yang tidak terlaksana. Hal tersebut dikarenakan manajemen pelaksanaan yang kurang baik serta usaha yang belum optimal dari tim pelaksana. Namun dari segi keuangan, pengeluaran yang terlampir sudah cocok dengan pedoman yang ada.
- c. Kecukupan pelaksanaan program jalin matra pfk di desa Sumberdawe masih dirasa belum cukup untuk membantu mengangkat krtp dari kemiskinan, mengingat bantuan program hanya beruba bantuan fisik, tanpa modal, dan bantuan hanya diberikan satu kali saja.
- d. Perataan atau pemerataan program jalin matra pfk di desa Sumberdawe sudah merata. Lima dari enam dusun merasakan bantuan ini. Hal tersebut muncul sebagai hasil dari komunikasi yang baik saat proses verifikasi kelayakan.

- e. Responsivitas pelaksanaan program jalin matra pfk di desa Sumberdawe sudah baik dan diterima masyarakat. Data yang akurat terkait penerima program dan kerja pendamping desa di masing masing pokmas yang fleksibel dilapangan mendorong program ini berjalan secara maksimal.
- f. Ketepatan atau kelayakan program jalin matra pfk di desa Sumberdawe sudah cukup baik dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut peneliti pahami sebagai hasil dari verifikasi kelayakan krtp yang terlaksana dengan baik, pedoman umum yang dilakukan dalam pelaksanaan di lapangan. Walaupun secara pemanfaatan masih ada yang menjual bantuan, tapi masih ada krtp yang memanfaatkan bantuan secara maksimal

5.2 Saran

Kesimpulan di atas memberi gambaran tentang evaluasi pelaksanaan program jalin matra pfk di Desa Sumberdawe tahun 2018. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai upaya meminimalisir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program jalin matra pfk, adapun saran yang dapat peneliti berikan diantaranya sebagai berikut

- a. Pemerintah Daerah, yaitu memberikan pendampingan dan pelatihan serta mematakan mana daerah yang harus mendapatkan bantuan lebih dari sekali. Hal tersebut dikarenakan upaya pengentasan kemiskinan tidak serta merta bisa berhasil hanya dalam satu kali bantuan saja.
- b. Pemerintah Desa, yaitu melakukan bimbingan teknis dan pelatihan keterampilan bagi krtp yang sudah punya bibit usaha. Hal tersebut dapat membuat krtp lebih berdaya, karena tindak lanjut dari adanya program sangat penting apalagi bagi yang sudah punya bisnis usaha.
- c. Masyarakat, yaitu lebih proaktif terkait program pfk dan mau memiliki niat untuk terus berkembang dan berusaha. Setidaknya konsisten untuk tidak tergiur menjual hasil bantuan yang telah diberikan, sehingga manfaat program ini dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Bandur. A. 2016. Penelitian Kualitatif (Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis DataNVIVO 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta : Erlangga.
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-*prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kencana, Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Melayu, Hasibuan S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Moenir, H.A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Nurcholis, Hanif. 2009. Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta: Grasindo
- Raco, J.R. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Setyodarmodjo, S. 2003. *Public Policy (Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Silalahi, U. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sujarweni. V. W. 2014. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Usman, Hundaeni dan P. S. Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian*. Edisi kedua. Cetakan ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

E-Book

- Chant, Sylvia. 2007. *Gender, Generation and Poverty*. USA. Edward Elgar Publishing.
- Chant, Sylvia. 2010. *The International Handbook Of Gender And Poverty*. USA. Edward Elgar Publishing.

- E. Bullock, Heather. 2013. Women and Poverty Psychology, Public Policy, and Social Justice. United Kingdom. Wiley Blackwell Press.
- M.Rai, Shirin. 2003. *Mainstreaming gender, democratizing the state?*. United Kingdom. Manchester University Press.

Produk Hukum

Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera.

Lembaga

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

Internet

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/25/154008526/kemiskinan-masih-jaditantangan-besar-indonesia/

https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44861258/

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/14/berapa-jumlah-penduduk-di-pulau-jawa-2019/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190214000706-32-369093/khofifah-sebut-kemiskinan-akut-di-desa-jadi-masalah-di-jatim/

https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/kemiskinan-perempuan-perbatasan-sebagai-manifestasi-gagalnya-pembangunan-negara/

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-1-no-poverty/

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3607884/sri-mulyani-ketidaksetaraan-gender-timbulkan-kemiskinan/

https://tirto.id/bps-masih-ada-kesenjangan-laki-laki-perempuan-di-ketenagakerjaan-c9lR/

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/februari-2019-angkatan-kerja-di-jatim-21-59-juta-

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4132083/jadi-gubernur-terpilih-ini-langkah-khofifah-benahi-jatim

LAMPIRAN

Lampiran A. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara I Bagi Penanggungjawab Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo)

- 1. Apakah bapak/ibu berkenan untuk membagikan dokumen profil wilayah kabupaten probolinggo?
- 2. Apa visi misi pemerintah kabupaten Probolinggo dalam upaya pengentasan kemiskinan berwajah perempuan?
- 3. Apakah faktor yang melatar belakangi tingginya angka kepala rumah tangga perempuan (KRTP) yang hidup dibawah garis kemiskinan di kabupaten probolinggo?
- 4. Bagaimana Gambaran umum pelaksanaan program di Probolinggo sendiri?
- 5. Selama lima tahun program feminisasi kemiskinan berjalan, bagaimana pandangan bapak terkait program feminisasi kemiskinan bagi kabupaten probolinggo?
- 6. Bagaimana menurut bapak/ibu kondisi kemiskinan sebelum dan setelah adanya program feminisasi kemiskinan ini?
- 7. Siapa saja ackor yang berperan dalam pelaksanaan program ini dan bagaimana perannya?
- 8. Adakah upaya inisiatif dari pemerintah kabupaten untuk menstimulus pelaksanaan program ini agar hasilnya maksimal?
- 9. Adakah keterpaduan program ini dengan kerja dinas dinas yang lain?
- 10. Apa langkah yang bapak/ibu lakukan dalam upaya fasilitasi dan pendampingan program ini
- 11. Apa harapan bapak/ibu terkait program ini bagi masalah kemiskinan di probolinggo?

Lampiran B. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancar II

Bagi Pelaksana Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dan desa Sumberdawe

- 1. Apakah bapak/ibu berkenan membagikan data terkait program feminisasi kemiskinan di desa ini?
- 2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu selama mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program?
- 3. Apa penyebab tingginya angka kepala rumah tangga perempuan miskin di desa/kabupaten ini?
- 4. Bagaimana langkah pendampingan yang bapak/ibu lakukan?
- 5. Apa kendala atau tantangan selama mendampingi pelaksanaan program?
- 6. Apa masalah masalah yang pernah bapak/ibu temui dilapangan?
- 7. Menurut bapak/ibu, apa dampak program ini bagi masyarakat dan persoalan kemiskinan didesa ini?
- 8. Adakah Inisiatif usaha yang bapak/ibu lakukan dalam teknis pelaksanaan program?
- 9. Apa harapan bapak/ibu bagi program ini?
- 10. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi sebelum dan sesudah adanya program ini yang bapak/ibu temui di lapangan?

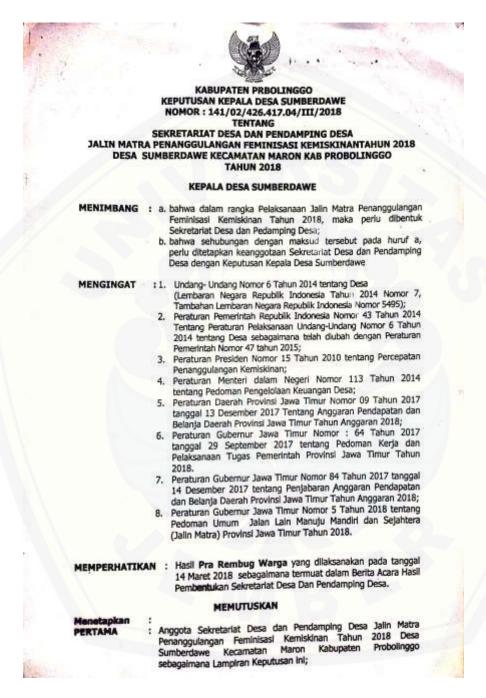
Lampiran C. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara III

Bagi sasaran atau penerima program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dan desa Sumberdawe

- 1. Bagaimana kondisi ibuk setelah menerima program ini?
- 2. Apa permasalahan mendasar ibuk dalam hal ekonomi?
- 3. Sudah cukupkah bantuan program dalam membantu mengatasi permasalahan ibuk?
- 4. Berapa penghasilan kotor ibuk selama satu hari?
- 5. Kebutuhan apa yang memiliki porsi besar dalam kehidupan ibuk?
- 6. Menurut ibuk, apakah program ini benar benar ibuk rasakan manfaatnya?
- 7. Apa manfaat yang ibu rasakan itu?
- 8. Apakah proses pencairan bantuan itu lama?
- 9. Kalau lama, menurut ibuk apa penyebabnya?
- 10. Apakah ibu merasa didampingi dalam hal pemanfaatan bantuan itu?
- 11. Apakah ibuk mengalami peningkatan terkait kebutuhan ekonomi dari sebelumnya?
- 12. Apakah ada langkah pemberdayaan non bantuan yang ibuk dapat dari program ini?
- 13. Adakah fasilitasi atau usaha yang ibuk terima dalam hal memudahkan dan mengembangkan usaha ibuk?
- 14. Apakah omset usaha ibuk bertambah?
- 15. Apakah distribusi program ini sudah merata di desa?
- 16. Apa harapan ibuk bagi program ini kedepan?

Lampiran D. Surat Keputusan Kades Sumberdawe terkait program jalin matra PFK



KEDUA

- : Menugaskan Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :
- Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi melalui Rembug Warga;
- Memfasilitasi verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP:
- Membantu menyalurkan bantuan barang kepada KRTP sesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam keglatan Jalin Matra PFK;
- d. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di KRTP;
- Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PFK di masing-masing Desa;
- f. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra

Memfasilitasi pengadaan barang bantuan KRTP.

KETIGA

- : Menugaskan Pendamping Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :
- Memfasilitasi verifikasi calon rumah tangga sasaran dalam forum rembug warga;
- b. Memfasilitasi pembentukan kelompok KRTP;
- Melaksanakan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP;
- d. Memfasilitasi dokumen pencairan BKK Desa;
- e. Memfasilitasi Rembug Pokmas Reviu rincian usulan kebutuhan
- Mendampingi dan memantau penyerahan barang kepada KRTP oleh Pemerintah Desa;
- g. Memfasilitasi dan memantau pengelolaan dan pelestarian bantuan yang dilakukan oleh KRTP;
- Memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan;
- Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program BKK Desa;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan keglatan kepada Pendamping Kabupaten.

KEEMPAT

 Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dan KETIGA Sekretariat Desa dan Pendamping Desa diberikan honorarium sebagaimana terlampir.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Desa Sumberdawe Pada tanggai : 19 Maret 2018



Lampiran E. Surat Ketetapan Kades Terkait Penerima Bantuan



KABUPATEN PROBOLINGGO KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERDAWE NOMOR: 141/03/426.417.04/IV/2018 TENTANG

PENETAPAN KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN PENERIMA BANTUAN JALIN MATRA PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN **PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018** DESA SUMBERDAWE KECAMATAN MARON KAB PROBOLINGGO **TAHUN 2018**

KEPALA DESA SUMBERDAWE

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Kepala Rumah Tangga Perempuan Penerima Bantuan;
- Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Kepala Rumah Tangga Perempuan Penerima Bantuan dengan Keputusan Kepala Desa Sumberdawe

MENGINGAT

- : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 64 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Jaian Lain Manuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

- MEMPERHATIKAN : 1. Hasil rembug warga Verifikasi calon KRTP Program PFK;
 - 2. Hasil klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP program PFK yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping
 - 3. Hasil Rapat pengelola Desa dalam rangka pembahasan dan penetapan KRTP sasaran program PFK

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Daftar Kepala Rumah Tangga Perempuan Penerima Bantuan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Desa Sumberdawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Sebanyak 65 Rumah Tangga sebagaimana Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

 a. Daftar Kepala Rumah Tangga Perempuan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA akan membentuk Kelompok Masyarakat;

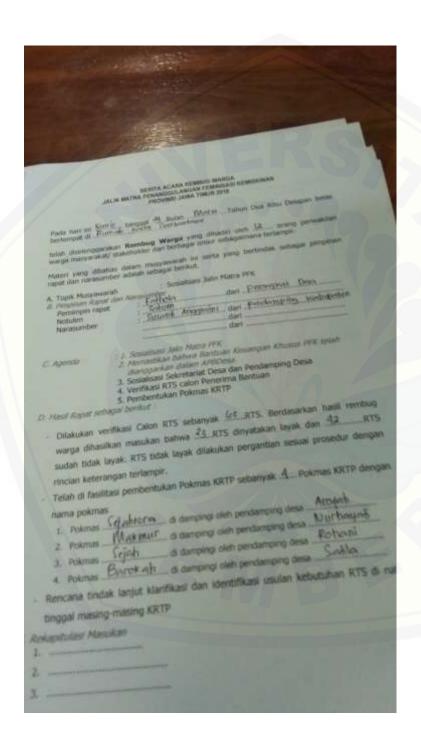
 Pemberian bantuan dilakukan dalam bentuk barang senilai Rp. 2.500.000, sesuai dengan rincian usulan kebutuhan KRTP yang mengacu pada Pedoman Umum dan peraturan yang berlaku.

> Ditetapkan di : Desa Sumberdawe Pada tanggal : 23 April 2018

> > KEPALA DESA SUMI ERDAWE

JAZULI

Lampiran F. Berita Acara Rembug Warga



Lampiran G. Berita Acara Rembug Pertanggungjawaban

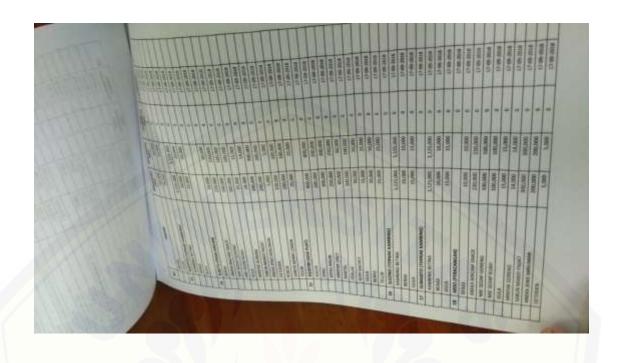
	BERITA ACARA
REMIR	BERTA ACARA O PERTANGGUNGJANABAN
	Description of Parameter Report Control Contro
Dutam rangka pelaksaraan Jam Man	Sumbardows.
Totale angle 2018 di Desa Foxecti rocco make pada Foxecti rocco make pada Han, tanggai 13 co Pukal Pukal	The production of the second s
The state of the s	The state of the s
Funds	Process Ingung/awaban yang dinyan oleh grang yang terder dan beraga mendangang Desa, serta peradahan asaga menyamkal beraga mendangan hada tertampir dan dantar hada tertampir dan peradahan menala pengabangan pengangan pengang
Rembug Perta	ngungjawaban yang Dose, serta perashilan wanga
Personnan Desa, Sekroteral Desa,	Torage Perdamprid Dose, seria general Fernanda Perdampri last dan dantar hada seriampri last dan dantar hada seriampri last dan dantar hada seriampri last dan perdampri last dan perdam
sebegamana tercentum datam resignatur	rembug mi serta yang
Materi arau topik yang darikat narasumber adalah sebagai berikat	Parallegram Feminisani Kemakinan di Deta
A. TOPIK REMBUG	naan Jalin Matris Penanggulangan Feminisasi Kemiakinan di Desa KKRON Kabupaten (P.50565K 19560) anjut Kegiatan
Converteure Reconstant V	equit Keglirlan
2. Pembahasan Recana Tiodok I.	min section 1
	AMER Control letter be a lette
B. PIMPINAN RAPAT	Amfeb dan Pendemens
Sekretaris atau notulis	Archeological dan Pendemping Deservices dan Pendemping Februaren Sutrant Archeological dan Pendemping Februaren dan
Narasumber 2	Sutout And Survey dan
3.—	gulangan Feminisasi Kemakinan Provinsi Jawa Tahur Tahun 2018 di M ATON Kabupaten (tizkok 1930 kelah selesai diaksanakan M ATON Feminisasi Kemakinan mengalami tidak kendala
dalam pelaksanaan Jain Matra antara lain: Terhadap Pertanggungiawaban Ferninisasi Keruskinan Provins menotak/menorima penuh/meni	pulangan Peminisasi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ta N. AFON Kabupahen(tizkoli 1930 telah selesai diaksanakan. Penangpulangan Feminisasi Kemiskinan mengalami tidak kendala Kemajuan pelaksanaan kegiatan Jakin Matra Penanggulanga Kemajuan pelaksanaan kegiatan Jakin Matra Penanggulanga Jawa Timur Tahun 2018, peserta rembug sepakat untu
menoral/interrorder	
3	
b	D. Louisian data
The state of the s	rekomendasi Rencana tindak lanjut, Pelestanan dan
 Rembug telah menghasilkan beb Pengembangan Program, terdiri 	erapa rekomendasi Rencana tindak lanjut, Pelestanan dan dan
D	- Indiana
6	an disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat di
have been acare in dibust di	an disahkan dengan peron
genikish Denia soom	Compardoure tanggal 25 November
bagaimana mestinya.	SHEETING THE WAY
	Yapala Dasa
and the Const	The state of the s
Pernimpin Rappi.	
11	a large a creat with
(VIL-	January Th
Jil.	12 77
119	VO 100
10 .	14200
IL LEDOVENN	
Au	
The section of the last	THE RESERVE AS A SECOND

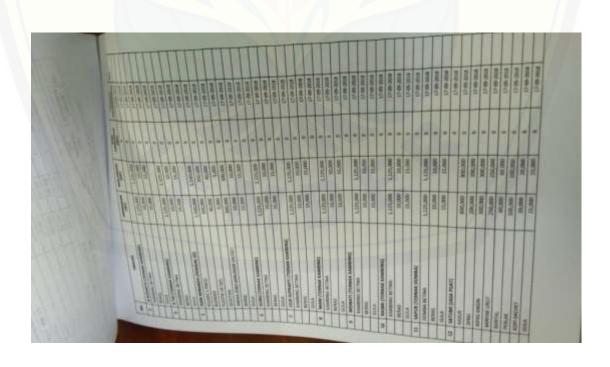
Bulli Dies Conserdence TTD. **HAMAY** Figure ordinary KUN Halton Sunt and note CATILA PHI HOLA Rt of Pus co Jamhuri Stronged Dan HWAM SAFU Percented Des FT of WW C MISHAMAD LUTE pend desa Southedness Acoinn Description (Dec. 14 27/04 lepsp. Schwinered wind Tirje /Armire find desa RT 12 CW 0 ROHAMI Kade Sunte und aure Purd kab mant A 塘

Lampiran H. Daftrar Hadir Rembug Warga

Lampiran I. Laporan Keuangan Program

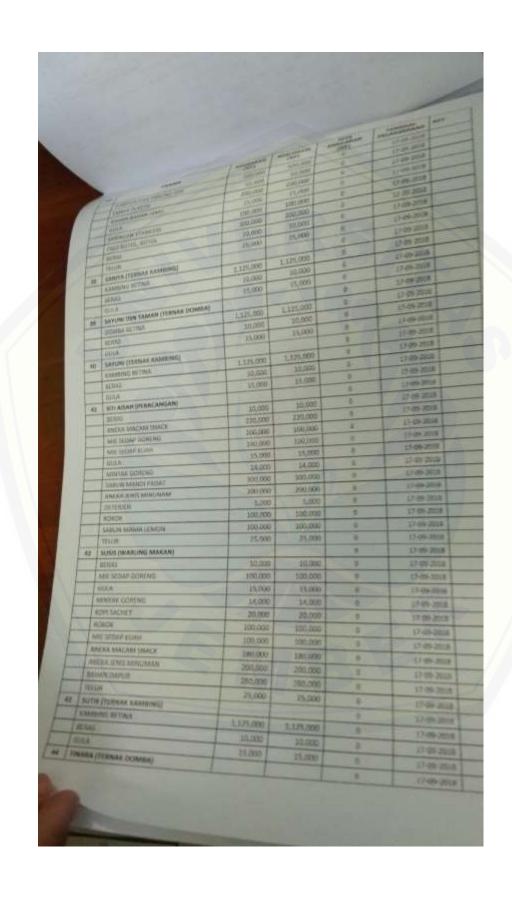
		-					-	1
				_			THE REAL PROPERTY.	
				AM DIAM	A OFFI DE	SAL MICH	60	
			CALIFORNIA PRINCIPAL	NAME OF THE	PATER PA	1 10	MANUFAL MANY	30
	-	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	TANDAMAN "	CHLISTERS.	AMDUARN	o per	SECULAR SET	-
8		MARKET	(80)	(m)	-	-		
-	7	THE PERSON NAMED AND POST OFFICE ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND POST OF T		- 10		-	13 (1-2018	
	4.0	DESCRIPTION OF THE PARTY DESCRIPTIONS	1,000,000	T-000/000	1		23-11-2016	4
-	411	Print and Published	3610,0001	MHU.000	- 0		33-11-2618	
Z	0.8.2	April 10	400,000	600,000	3		23-12-2018	
	44.5	SALES	PM,000	750,000		- 1	29-11-2019	-
н	5.5.8	Monte	150,000	600,000	4		25-11-2018	
н	1.1.1	Nigota	900,000	A,500,000				
H	138	POTAL SUR 3.3	4,500,000	- Company				-
	1.2	CONTRACTOR OF STREET, AND STRE					- Table	
f	133	Harrising Warge (Smallmost/ Perform	2 000 000	3.000.000	31		19-09-2018	
	100	- Romansi reput /stock.	3.000 000 529 000	\$30,00E	- 0		19-09-2018	
	-	Perferquent	380,000	500,000	0.		19-09-2019	
	1	Count Backdarp	900,000	900,209	8	-	19-09-2018	
	1.2.2	Spriding Pulmers	1,000,000	7100100		-	The state of the s	
		Name and Address of the last	130,000	130,000	11	1	19.09-2019	-
П	1,2,3	Stopa Varianger Gerthaus der specifiken SETP	1,000,000	1,960,000	0		15-09-2018	_
=	123	Sunfoan Neva Perpetation	-		0		19-20-2018	_
-	133	Keenhretsrigten	-	300,000	1 3		19-09-2018	
-	100	Donarrentani	100,000	100.000	0	1	19-09-2018	_
-	+	- Spirit A Published Program	100,000	100,000	1		19-09-2015	-
=	+	- Principle State Sead Sead Seasons	100,000	100,000			19.09-3016	-
	122	A AND THE REST OF THE PARTY OF	18,500,000	10.500,000			39-50-2018	-
		PERSON E.P	The second secon		1 2			
11	TEN	AGA PENDAMPING DESA (3% dari Yu	8,125,000	8.325.00	0	ů.	14-09-2018	-
	2.1	HOMORABRIM Personaging Design	8,125,000	1 10000	0	1		
		SHE FORM II	8,123,000					
m	BAN	TOAN REPADA SISTE						
E	JALLS 1	WAFA (PENISIAL GORENGAN, PENTO	~	-	-	-	17-09-2018	9
		SOSIS) ING TERIGU	12,000		100	n	17-09-2018	
-		ER MACAM SOSIS	250,000			0	17-09-1016	
-	-	YAK GORENG	14,000		100	9		-
		EA MACAM SNACK	200,000	-		0	17-09-2018	-
-	Anie	CA ASACAM MENUMAN	200,000	_	200	0	17-09-2018	-
		POR DAN TABLING GAS	500,000	500.0	000	0	17-09-2018	
		M RESAR «SPATULA (BOTTL)	150,000	150,0	000	9	17-09-2011	ALC: UNK
F		ANG BASSO KECIL ALUMINIUM	200,000	2003	000	0	17-09-201	10
		TOMAT REFILLE	150,00	0 150,	000	0	17-09-201	8
	- Contractor	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	250,00		000	0	17-09-20	18
	-	MANIS REPLL	160.00	100000	00000	0	17-09-20	181
	-	OS ES RECR.	10,00	-	000	0	17-09-20	AR.
	BERAS		-			0	17-09-20	CHANG S
	SAJLA		15,00	15	.000			-
1	ASEX (TERNAX DOMBA)				0.	17-09-2	-
	DOMB	ABETINA	1,125,00	0 1,125	,000	0	17-09-7	DIB
1	BERAS		10,00	0 10	.000	0	17-09-1	8718
T	GULA		15,00	0 15	000	0	17-09-	2019
-			4,000	-	Name and Address of the Owner, where	-	1 200	



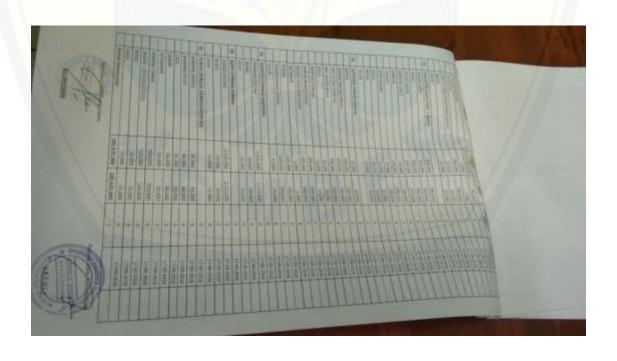


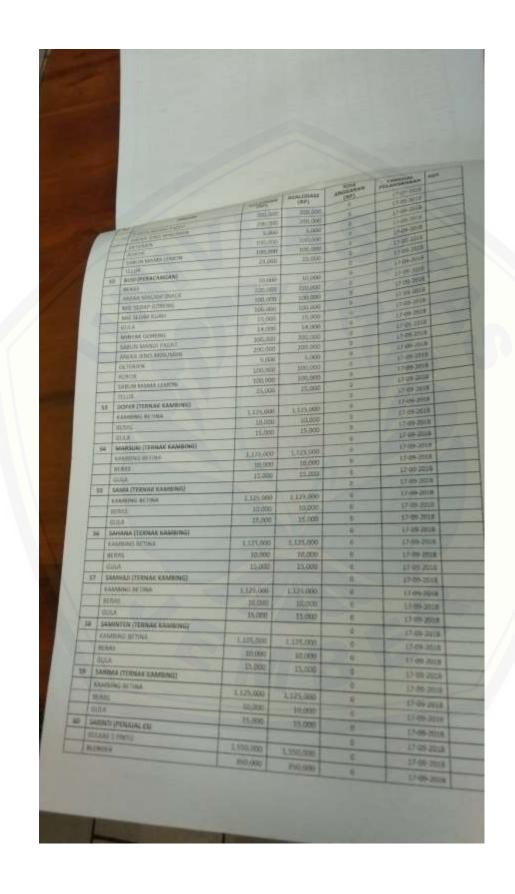
		-	HEALTHANK	AMERICANAN I	TAMOURA NEW
	SALUA .	AMURARAN (MF)	(907)	(47)	27 de 2001
1	OF AN (TEXADE RANGE)	1,125,500	1,525,000	2	Character and Ch
A	BATTER BETTER	\$11,000	10,000	0	13-00-3019
п	ALDON	13,000	FURN	1	17 25 9238
	200 ASSESTO CTENNAS DOMBAS	1,125,000	1,125,000	-	TANKS SHIP
	STIMBS DETINA	\$1,000	10,000	-	E) 40% 30109
	nertal.	35,000	15,000		17 00-2018 17 00-2018
	25 B SUMMERSO (PERSUAL RIDERS)	100,000	530,000	- 5	13-53-50EB
	AT NUMBER OAR TABLING DAY	156,000	190.000	3	13-09-3039
	WHAT SPATIAL HUNGS	303,000	350,000	-	(3-00-min
	BANKAN TOTAK.	14,000	30,000	0	17-05-2018 17-05-3018
	KACAME TAMULMENTAN	65,000	90,000	.0	11-09-3018
	SERVICE PLANTS	60,000	60,000	1	12:00 2010
	TEND ATAO CENT CON SACHET	20,090	10,000		15 00-3518
	16335	111,000	150,000	- 1	17-09-2050
	FARCI LANGUENE	19,000	35,000	1	17-09-2018 17-09-2018
	55.54	29,000	25,000	- 0	17 09 2518
	22 NURHAUYAH DASA PUATI			-	12:05 7058
	22 NURHATTAN DASA PIDAG	100,000	200,000	- 4	13-03-2018
	9280	300,000	100,000	8.	17-25-2018
	ADERS MADER	190,000	250,000	tt	17-49-3019
	ANDIYAK DRUT	600,000	60,000	1 1 1	\$7-09-3018 27-09-3018
1	PERLAN	100.000	100.000		17-00-2018
Ť	KOM SACHET	30,000	50,000	0	17-09-2019
t	BULA	15,000	10,000	1	13 49-3015
E	BERAS	25,000	25,000	160	12-09-2018
10	1910s	-		0	17-09-7515
P	DOMBA BETINA	1,123,000	1,125,000		13-09-3018
Н	SCHALL STATES	10,000	20,000	2	17-09-7218
	FILEX	13,000	15,000	0	0.005-00-00
24	The second secon	1	WANT.	0.	17-09-0018
	KANTONI BETINA	1.125,000	1,175,000	9-	17-09-3018
	MERKE	10,000	10.000	- 1	17 09-3008
	SALA	15,000	15,000	4	17-09-2018
25	SIRA (TERNAK KAMBING)		-	3	17 49-2018
	KAMMAG SETIMA	1,125,000	L125,000	7.8	17-09-3019
	BERAS	10,000	10,000	0.	57-00-2018
	COLK.	11.000	15,000	0	17-09-2015
53	DUME (TERNAL CAMENG)				1705-2018
-	ARMITAG RETINA	1,175,000	5,325,000	0	17-09-2008
1	SERVE .	10,000	10,000		17-09-2018
L	ELLA.	15,000	15.000		£7-409-20008
13	ULENA /TERNAR EASIEING)			_	-
Į i	AMERIC SETINA	1.125.000	2.7.15.700		17-09-3051
			1.115,000	21 9	17-09-201

4				1-10-1	-	三陸聯
			1 44		-	
	A	-	1111	£ 1.P3./59!	-	17-00 5018 17-00 5018
		1	1100	10,100	3	17-30-3019
	E	March 1150mil Assessment	10.153	18,000	3	17-26-2018
	P		1500	1,135,000		17-109 1010
	E		ESPS 000	10,000		17 (19 7018) 57-09-2018
М	14	SUPERING DE LINE ENERGY DE LINE ENERGY DE LINE ENERGY DE LINE	10,000	19,000	0	17.00-2018
	1	STATE OF THE PERSON OF T	10.00	1000	0	17-09-2018
и	-	SUMMAN SUMMA TERROR DOSESA.	L175,000	1.125,000	-	17-00-2018
	30.	SUMMA RETURN	10,000	15,000	0	17:09-2618
		HIR	13,000	-	0	11-09-2018
	-	Contract of the Contract of th	117.00	1,125,000	- 11	12:00:7038
	11	SE SHER PERMAN SAMERON	10,000	10.000	0	17:09:3018
		KAMING RITINA SERRE	15,000	15,000	0	12-00-2010
	H	ntl.		77 111 100	1	\$7.09 2018
	12	TARTO (TENAR DOMEA)	1,135,000	1,123,000	0	17-00-2016
		DOMES SETTING	10,000	15,000	-	17-09-2018
		BUAN.	32,000		1	THE RESERVE AND PARTY AND PARTY.
	33	PUNA (TERSIAE KAMBING)	4 700 000	1,115,000	0	17.09-2018
		EASTERN BETTER	1,525,000	10,000	0	13-09-2038
		HIANG COUNTY	15,000	15,000	-	17 (9-2018
100		IIIIA.	12200		F 9	75-09-5018
1		AND (TERRAL RAMIDAG)	1.125,000	1.125,000		17-09-3318
1		E (A)	10,000	10,000	-	13-00-5018
Ė		DAA	15.000	15,000		17-09-2018
1	22 A	UMINA (PERACANGAN)	10000	10,000	-	17-09-2018
1		SERVE MACKIN SNACK	220,000	230,000		17-09-3009
+		IF SEISH CONTING	100,000	100.000	- 0	17-09-2018
1		E SEDAP KOAH	100,000	100,000	.0	17/99/2018
	10	EA .	15,000	13,000	1	57-59-7018
	MI	HAR GORENG	34,000	14,000	160	17-09-30an
	-	LIN MANCH PACAT	#90,000	200,000	9	37 99 2010
	-	AX JENIS MINUMAN	200,000	200,000	9	17 09 2018
	808	HER.	3,000	5,000	4	13-09-2018
	_	V MAMA LEMEN	100,000	100,000		17:00-2018
	Hills	W. Commission of the Commissio	100,000	100,000	0	17-09-2018
16.7		NA (TERNAY KAMEING)	25,000	25,000	0	17-09 2012
		NE RETINA	1 115 000		. 0	17-09-3008
	DUN		1.125,000	L123,000	(8)	U-96-2018
Jo	CEA		10,000	32,006	- 1	17-69-2058
3 8	APIANT	(PONULL MANU)	33,000	13,000	- 1	17-09-2018
	/Max		-		-	17 69 2010
14A	MORE	SAN STAINLESS	150,000	110,000		17-09-2018
			775,000	275,000		1749-2018
					-	1 107 1018









Lampiran J. Berita Acara Penyerahan Bantuan

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG JALIN MATRA PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN (PPK) TAHUN 2018 No. 900/417.04/X/2018

Pada hari ini Senin Tanggal 8 Bulan Oktober Tahun 2018, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA	ALAMAT	NIK	L/P	Thn.	Jmih ART
ALI WEPA	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 02	3513174107380327	р	01-07-	3

menyatakan telah menerima barang bantuan program Jalin Matra PFK dari Sekretariat Desa sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan dengan kondisi BAJK dan LAYAK, dengan rindan sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	CHEK LIST	KETERANGAN
1_	TEPUNG TERIGU	10	KG	1	Lengkap
2	ANEXA MACAM SOSIS	1	PAKET	1	Lengkap
3	MINYAK GORENG	5	LITTER	1	Lengkap
4	ANEKA MACAM SNACK	1	PARET	V	Lengkap
5	ANEKA MACAM MINUMAN	1	PAKET	1	Lengkap
6	KOMPOR DAN TABUNG GAS	1	PAKET	V	The second secon
7	WAJAN BESAR +SPATULA (SOTEL)	1	PAKET	V	Lengkap Lengkap
8	DANDANG BAKSO KECIL ALUMINIUM	1	UNIT	V	Lengkap
9	SAUS TOMAT REFILLE	1	005	J	Lengkap
10	KECAP MANIS REFILL	1	DUS	1	The second second second
11	TERMOS ES KECIL	1	UNIT	1	Lengkap
12	BERAS	10	100	V	Lengkap
13	GULA	10	77.0	V	Lengkap
	9001	30	1/6	V	Lengkap

Demikian berita acara serah terima barang ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



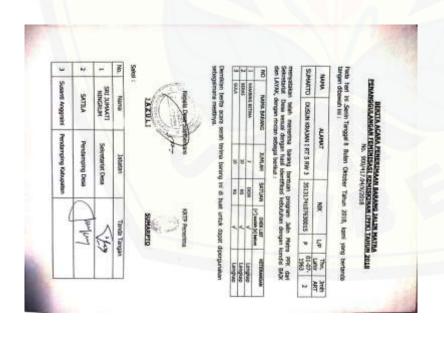


ALI WEP

Saksi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SRI JUMAATI NINGRUM	Sekretariat Desa	14
2	SATILA	Pendamping Desa	Muzy















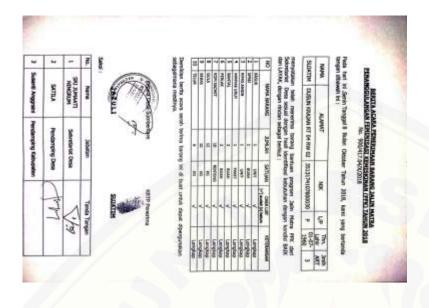








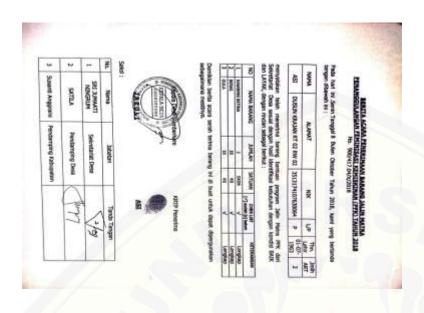
	2 30	MON 1	Name of the		Domitida berita sabagainera mo	12 min	н	Name of	B AKKA B	7 man k	Alens a		3 we son	Deta T	6	Selectarus De Selectarus De dan LADOM, des	SHERE	MANA	Rick hart let tangen dibase	MANAS
	MILIA	MUNICIPAL SECTION SECT	5		b acon seek nedbys.	0.1000	SONEL WWW HERE		CAN DRES VENTANA .	CONTRACTOR STATE		Harts	Chicago average	BERNE THE STATE OF	CHANNE WHEN	Das seud derge derges declar sebe	CHOS NOSTIC	1	Iri Serin Tangg mesh Iri I	SEMENATURES AND ADDRESS OF THE PERSON NATIONAL PROPERTY AND ADDRES
	Pendamping Desa	Selontarial Desi	NOMON	34	dy respect property		-			- 1	11	-	-	E	MONE	Section of the sectio	E Mai S L'A T MATMON MOSFIG	ALMANT	al B Retan Cessaer	NY LENGTH WATER THE
	1	100	Ц		- 2	2	Deli Sel	4	- SALET	407500		300	1	a	SATTAN	1	3613130			HIGHWAY BARA
	14	1	Tand		bait untuk digost diporpuratur		4								Manage at the	program Jain Plate RFK dati betsandam dengse konobi SAIK	3513170187460002	Đ.	Tahun 2018, harm	ZHAMI BARANS MLIN HATRA SL KZNISKINAN OPPO TANUN 2018 NEZOROGOLI
		5	Tanda Tangar	2	8		Ц	1	Ц	1				L	Į,	11		ş	3	HURW
		L			Walte		Н		U	1	l	1	10	amples	SWEEK	東東	9861	1	No.	100
ī							Ш	ı	Н	١	Ь	1	ľ	8	1	NA.		A K		



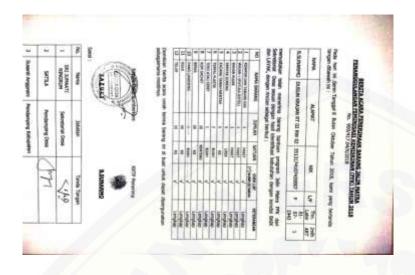








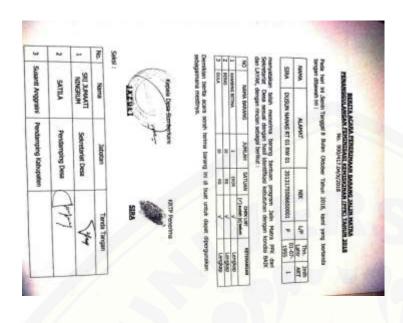










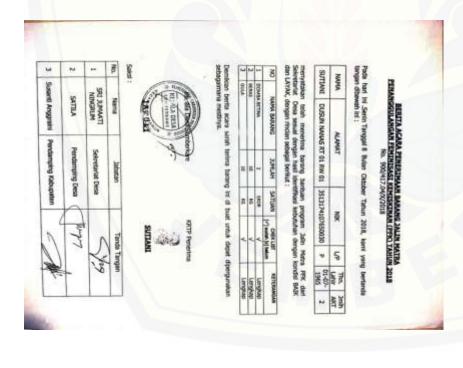






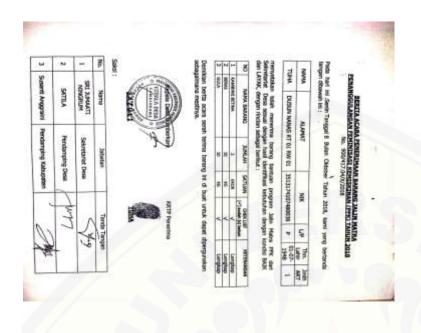












(s)		ł	Pendamping Fabuseter	County Avenue de	
S	3	N	Pendanting Dose	SATILA	*
arthu.	0		Selectorist Desi	MATERIAL LEMMATIC DES	*
	Tanda Targer	L	Memory	Men	100
	1		7		E
e divergrana	beens basing in it built until datet diperpurikan	3	weath belease barrier	Derritur beta acas adagainaru medaya	11
anger.			K M	and man	
STATE OF THE PERSON NAMED IN	ACTION LA	MATERIAL MAT	inthett be	DESIGNATION OF THE PERSON.	- 8
latin Habis JPK dari Lidengan kundai IMSK	edutatan degan kundal MIX kebutatan degan kundal MIX	1	Series of the last	renyelidan telah memelasa selahkarian Desa sesuai danga an LAYAK, dengan rentas selah	881
5 1994 e	35131754107660000	38317	TANK BE LIN SHAW MISSING	WEST DAW	E
Life State	NRC		STANCE	interes	1
yes default	MAN TERE UNA	10	fluids Facil tel Scrick Tonggal S Skiller Obsober Taleysh 2018, Name yerny Singler diffuentis ke i	Pada Neri Iri Serbi Singan dibawah Iri I	82
NUM ARGA	CHANG JALLE IS CHANGE THE SAME	SERVED	BERTA ACARA PENERDINAN BARANG JALIH MATIA PENANGGULANGAN PENERDAKK KENGGUNAN PENG JANUH 2014	PROBLEMENT	



		No.	Pendamping Kabupatan	Superi Augment	u
4	LAN	1	Pendanting Desi	SATILA	M
	(7)	989	Salestant Des	MTHEFATH LLYMACK DIS	*
	orber mari	Ĺ	appoint	STATE OF THE PERSON NAMED IN	ř
	A STANSON		1		Ē
	OTT Peoples				
dedust	e e	2.0	E E	Britis .	
- Deplay	10) sept 10 man	SATUMS HWITHS	2	-	8
AN ON	100	bertain pro berdificasi ke	telah menerina takong l Desa sesual dengan hasi id bengan rindan sebagai baritu	ten LAYAK, dengan rindan sebagai berikut.	881
1961	d toodystoticities	-	DUSTA WAS ELL 23 EM 1	VANDAGE VARMAN	2
51	MX L/e		TANKE	Menn	2
8 2	BESTTA ACANA PENDENBANA BARAHS JALIN MATIA PENAMBUHANGAN PENDENSASI MENGRAMA DEPOLTAHUN 2018 IN. SONYI JANJADIA Indi HI Serin Tanggiri Si Salan Cender Tahun 2018, kara yang deri PERSAMBAN HI T	MAR BARA AMMERCI ST. DAVIZOUS BOOKE TIME	AR PENESTRANS AN PENESTRANS AN PONE AN PONE AN PONE AN PENESTRANS AN PEN	RENTA ASANA PENERJEMAN BARANG JALIN MATINA PENAMBGULANGAN PENERJESAK KINESICIAN (PENI TAHUN 2018 NA 90047) ANATOM PENINGAN PENINGAN PANGAN PAN	88





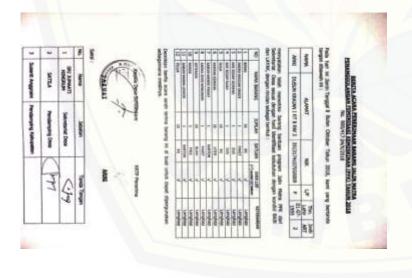


SEES TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOP	3	Receipted Desa Puncherging Desa	SATILA	A
and the same		Relativist Desa		
Western Western	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	MINEMAN LLYMANIC RES	-
	8 / 9	Appen	tora	F
	d hat only	11		I COM
dated dangural		restoa hanney ini di haat untuk dajob dipo	desiste bets cars seen degreeses medicin.	argent desired
V 100		1		04 TE
(A)	-		HERN DAPUR	2
	138		ATAME SECTION STREET	0 0
Lang.	No.		Per dictary arrang	L
A Tables		-	ROOM	
	8		DOM/WID	
Modern A	100	4 5	NAME OF TAXABLE AND ADDRESS OF TAXABLE AND AD	
1	100	-	WE STAND FOREIGN	
Ondown A	-	×	1000	
Colorina analysis	MUNICIPAL NATURE	W WHITE	DEWNING YEARY	8
oragon Jain Hers PR Get sebasten degen kondis SAD		na barang bartuar ngan hadi dendifiksal diagai berkut i	kun teleb menerbra set. Desa sesual denga Mr, dengan dindan seba	remyelatur Salordana dan LANNA,
360 d 00	DESCRIPTION	-	DUSLIN STAGAN E RT 9 RW 2	SISSE
To Sav	100	907	TOWNS.	NHOW
MANANG JANJA MATTA SESSITIAN ZERSO TAHUN JOUR NOTHER	MANANG JAKAN HATINA BEGINAN DETIG TANNAK (2018 Tahun 2018, kumi yang	D PACE	PENANGGULANGAN FINISHS PENANGGULANGAN FINISHS Nort as Jorda Tanggal 8 Dalan In diswash isl :	No or

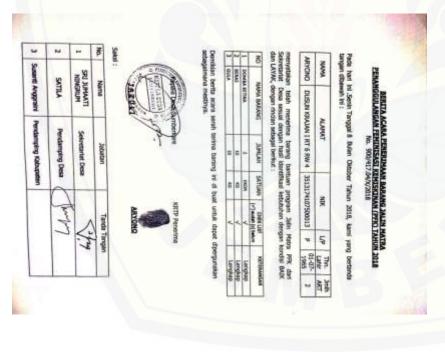




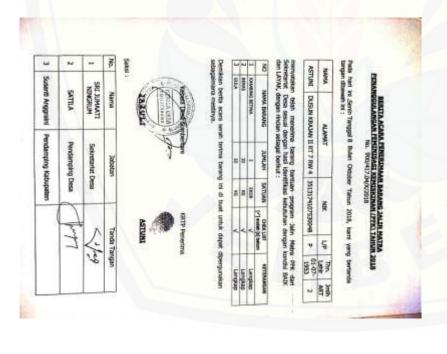


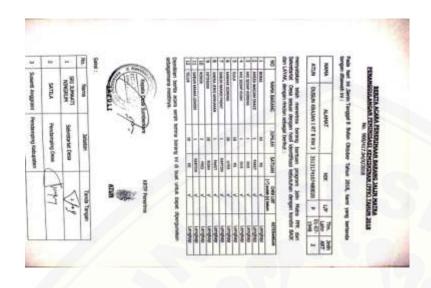












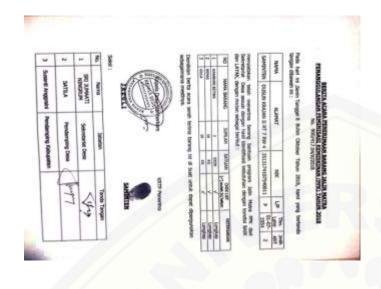
		T SHI I	9	Salai :	Car.	Denistan ber sebagainnana	12 mat	ч	NOMON GIL	STATE OF	7 January	B Market Ballet	AMERICAN AND A	1	2 MEAN	No.	dan LAWA, d	SES	NAMA	Pada fairi se Sangan dibaw	CHANGE
	SATEA	MINORIN TEMPORE NE	Meta			dan berka acara sereh pirsana mestinya.		ACHOT WWW. MIGHT		ADD THE PARTY AND ADD	(ABUN MANUS PROK)	(palents	de attent	WELL SERVICE CONTROL	WHEN WISCOM DRIEGE	THURS BULLAND	teleh memerima Jesa sesuai denga engan rindan saba	CYCK HYSTO		Sente Tangg	UNICORNIA
Agentes services	Rendarithing Desi	Salarstantal Desa	Jahatan		33	on better being to of built which dapet		-	140	18 -					-	m)er	863	C MAY 9 JULY ANYTHEN HISTO	ALAMAT	9	NATIONAL LIBERTAGE KENTENDAM TAKE TAKEN TOWN TOOLS
	1	8				0 10		MARKE	1381	0,000	407700	980	900	910	Marri	MULM	Contract by	1890CB/0114/1515E	NO.	Ser Tatus	WINDSTRANT SPANS
	T	1	1			K with a	4	<	<			4				MICHIGANIA (A)	brogan 3dn He brouther dirigen	19900300	Ħ	Yahun 2018, kens	CHATTER
	1	3	a Targer		3	Ř 9	L	Ц	Ц	1	L	Ц	1	L	Ц	1	20.00	٧	ş	No.	KNIN
			1			dpergrakan	Lings	Lange	Cardian	Lings	Lange	degrap	and and	Lenga	Languag	denotes .	MAY ON	1960	The state	100	2018
_			-	*.			8	å	8	8 4	8	8	8 4	8	8	8	, A a	*	51		







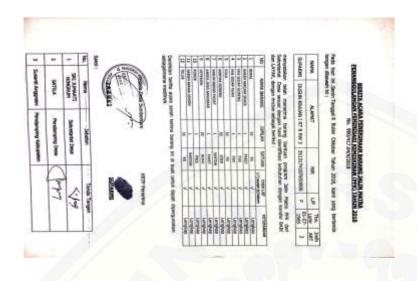


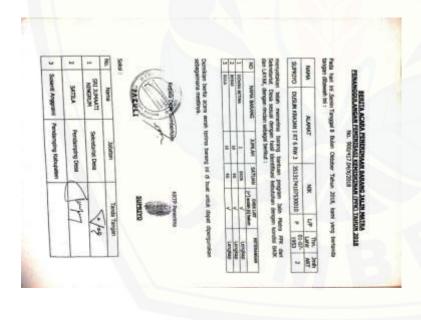












Lampiran K. Dokumentasi Penyerahan Bantuam











Lampiran L. Dokumentasi Wawancara







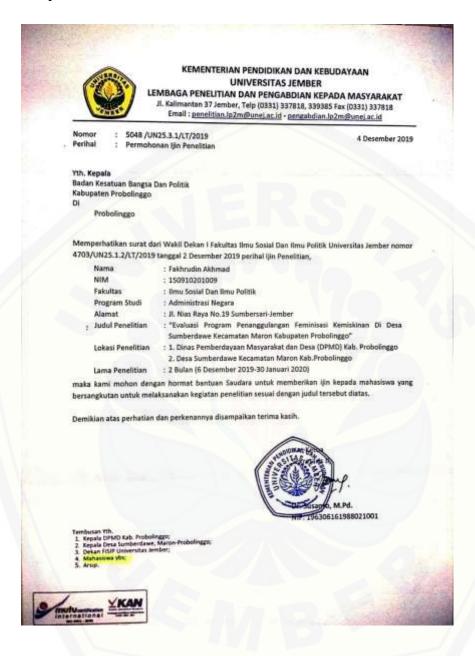








Lampiran M. Surat Izin Penelitian dari LP2M Universitas Jember



Lampiran N. Surat Izin Penelitian BAKESBANGPOL Kabupaten Probolinggo



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani 23 - Telpon (0335) 421440-434455 **PROBOLINGGO**

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor: 072/ 120 / 426.204/ 2019

Membaca

: Surat dari : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ertanggal, 4 Desember 2019 Nomor : 5048-UN25.3.1/LT/2019 Perihal : JEMBER Tertanggal, 4 Desember Permohonan Ijin Penelitian.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Probolinggo.

Di Desa, Sumberdawe, Kec, Maron

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan Survey Research oleh ; Nama Peneliti / Penanggung Jawah FAKHRUDIN AKHMAD Nama Peneliti / Penanggung Jawah

NIDN/NIM. 150910210009 Mahasiswa

Pekerjaan / Instansi Kejapanan , Rt/Rw 003/011, Kel/Desa, Kejapanan, Kec. Gempol,

Kab Pasurua

EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN FEMINISASI Thema/Acara Survey/Resarch

KEMISKINAN DI DESA SUMBERDAWE KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO.

Daerah / tempat dilakukan Survey / Research

Ijin berlaku 3 (Tiga) bulan sejak surat di keluarkan. Lamanya Survey / Research

Pengikut peserta Survey / Research Dengan ketentuan sebagai berikut

- Dalum jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
- Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
- Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pemyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
- Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
- Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.

 6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulun setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya
- secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, U Desember 2019

TEMBUSAN:

Ibu. Bupati Probolinggo (sebagai laporan) Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;

 Sdr. Kapolres Probolinggo.
 Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Probolinggo

Sdr. Forkopimka Kec. Maron

Sdr. Kepala Desa Sumberdawe

7. Sdr. Ketus, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

8. Yang bersangkutan.

KAN KEPALA ANDESATION BANGSA DAN POLITIK ROBOLINGGO ABUPATI

> UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si. Pembina Tingkat I NIP, 19690515 199003 1 009